

EVALUASI PEMILU, KPU TERIMA
KRITIK DENGAN TERBUKA

DPR PERCEPAT PEMBAHASAN
PERPPU DEMI KEPASTIAN HUKUM

EDISI II | NOVEMBER 2014

SUARA KPU

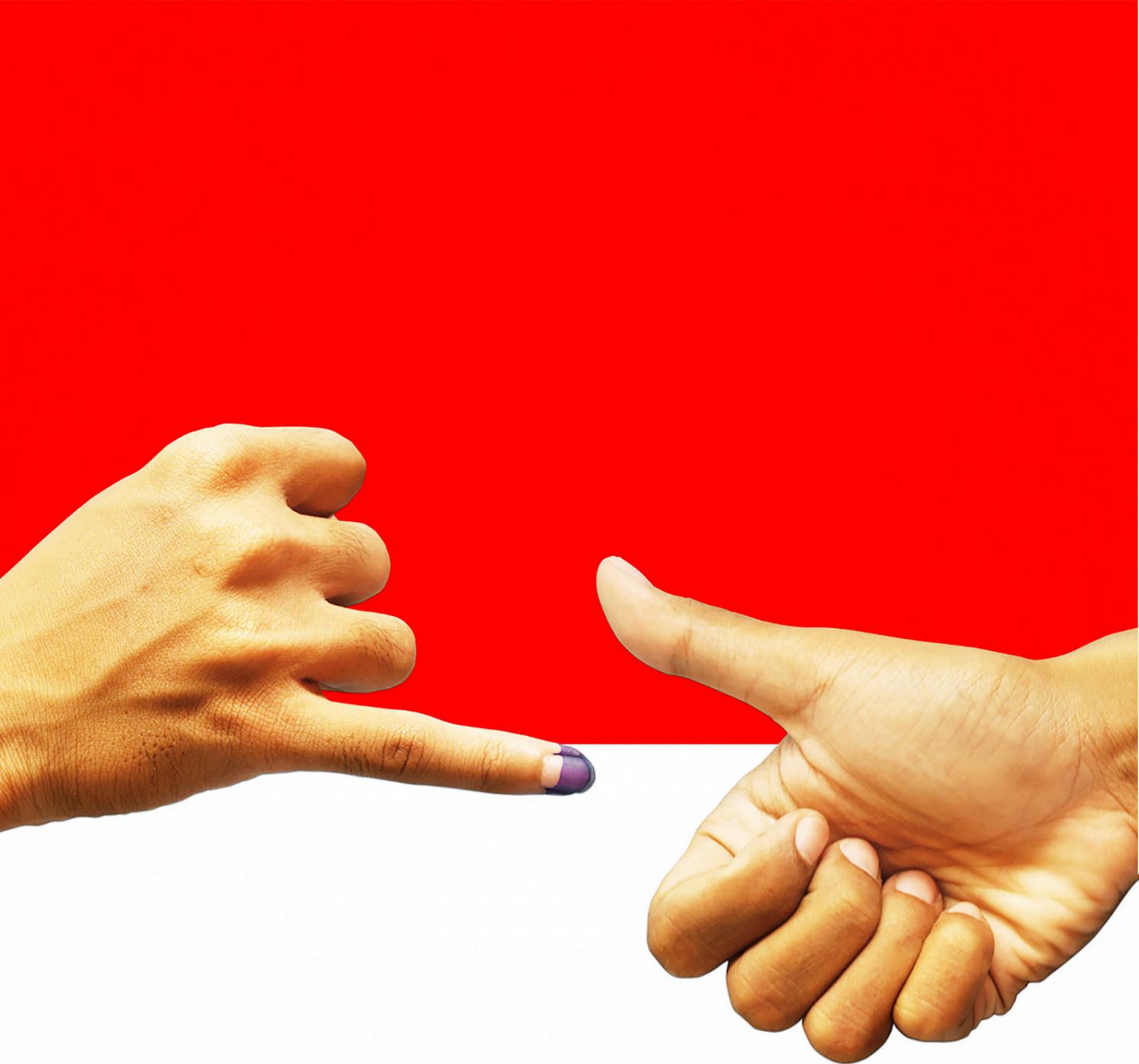
MENJAGA HAK RAKYAT TETAP BERSUARA DALAM PEMILU



ANGGOTA KPU RI: **IDA BUDHIATI**

LAPORAN UTAMA

“KITA SIAP PILKADA LANGSUNG & SERENTAK”



bukan untuk menang atau kalah,
MEMILIH adalah sebuah keberanian menentukan masa depan bangsa.



DAFTAR ISI



5

SUARA UTAMA

Antara Perppu, DPR dan KPU

Masa jabatan Kepala Daerah telah di ujung tengat. Sementara Perppu, pemilihan gubernur, bupati dan walikota masih harus dibahas di DPR. Tak ada yang bisa menduga dinamika yang akan terjadi di ruangan itu. KPU tetap menyusun segala instrumen yang dibutuhkan untuk pemilihan langsung dan serentak.

Halaman 5

13



IDA BUDHIATI

Kita Siap Pilkada Langsung dan Serentak

"Apapun putusnya, KPU siap melaksanakannya. Kalau langsung, kita sudah siap, KPU sudah menyusun regulasi. Kalau ada perbaikan dari aspek teknisnya, tentu kami bisa langsung bekerja untuk menyusun."

18



JURI ARDIANTORO

Mengawal Pemilu Sejak Dulu

Aktifitas kepemiluan bukan hal yang baru bagi Juri Ardiantoro. Ibarat daging dengan tulang, yang tak bisa dipisahkan. Juri telah mengawal pemilu sejak Orde Baru. Di era reformasi, Juri masuk menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemilu dengan satu tekad, memperbaiki kualitas demokrasi.

20



SALDI ISRA

Anak Kampung yang Jadi Pakar Ternama

Pakar ini lahir di lingkungan desa di Solok, Sumatera Barat. Maka hidupnya, sejak kecil, sudah ditempa dengan semangat membaja dan berkobar-kobar. Semangat dan kerja keras itulah yang mengantar anak desa ini menjadi pakar hukum tatanegara yang ternama dan berkelas.

22 Evaluasi Pemilu, KPU Terima Kritik dengan Terbuka

24 KPU Gelar Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Gelombang IV

27 Sistem Informasi Pemilu Butuh Penyempurnaan

30 Sepuluh KPU Provinsi Ikuti Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu

39 Dilma Rousseff Terpilih Lagi Jadi Presiden Brazil

47 Menjaga Pertumbuhan Demokrasi Lewat Pemilihan Langsung dan Serentak

58 Pemenang Lomba Foto Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum

Melaksanakan Kebijakan Sebaik-baiknya

SEJATINYA sebuah kebijakan dibuat melalui proses yang penuh dengan nilai-nilai utama, tujuan yang paling ideal, serta dipandu secara ketat dengan analisis-analisis cara tujuan, analisis ekstensif yang komprehensif dan dilandasi oleh pemahaman tingkat tinggi, dengan cara pandang yang didasarkan pada teori serta pengalaman yang sudah teruji.

Dari proses analitis yang intensif dan kaya informasi inilah, pemikir dari Eastern Illinois University, Richard A Wandling, percaya bahwa kebijakan yang relatif “terbaik” akan bisa dihasilkan, baik dari segi keputusan nilai dan tujuan, maupun dari cara mengevaluasi cara dan mekanismenya.

Sementara itu, dalam pandangan Paul Diesing, satu kebijakan juga harus didasari oleh rasionalitas. Rasionalitas ini bukan semata ditinjau dari sisi efisiensi ekonomis dan kemampuan struktural dalam menjalankannya, melainkan juga harus memperhitungkan biaya politik, implikasi dari satu kebijakan bagi publik—baik secara kultural, sosial maupun psikologis—dan kemungkinan timbulnya ketidaksihan terhadap suarau kebijakan yang tidak diterima dengan baik. Karena itulah, harus juga ada “pilihan rasional” dalam setiap kebijakan.

Dalam hal kebijakan menentukan cara memilih pemimpin, maka hal ini selalu tergantung pada dua hal, yaitu partai politik dan sistem partai. Menurut Leon D. Epstein, partai politik adalah sekelompok orang yang berupaya memilih pemimpin pemerintahan di bawah lebel tertentu. Sementara sistem partai diartikan sebagai sejumlah partai di dalam suatu negara selama masa tertentu bersama dengan



struktur internal, ideologi, ukuran, aliansi, dan tipe oposisi mereka. Sementara itu, secara khusus, pemilihan pemimpin publik merupakan cermin dari berfungsinya partai politik dan sistem partai. Sementara secara umum, pemilihan pemimpin publik lewat partai politik juga menunjukkan bahwa sistem demokrasi secara prosedural benar-benar fungsional.

Maka dari pemahaman ini, Schumepeter berkesimpulan bahwa demokrasi adalah setting institusional untuk menghasilkan keputusan, dimana dalam keputusan itu individu tertentu mendapatkan kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif meraih suara rakyat. Atau dalam bahasa Samuel Huntington, demokrasi adalah prosedur pemungutan suara yang adil dan berkala untuk memilih pemimpin negara.

Terkait dengan prosedur pemungutan suara ini, publik Indonesia bulan-bulan terakhir ini disibukkan dengan wacana dan mekanisme pemilihan

kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati dan walikota. Wacana itu, apakah kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat, atau dikembalikan lagi ke DPRD.

Wacana ini pun bukan saja membuka perdebatan tentang mekanisme bernegara ideal yang sesuai dengan demokrasi Indonesia, namun juga menjadi momentum untuk menguji kekuatan partai politik dan sistem partai. Wacana ini sangat menarik, dan bukan hanya melibatkan pakar hukum tatanegara melainkan juga para pakar politik. Lebih-lebih isu ini juga mengajak publik menengok kembali beberapa tahun lalu; apakah pilkada yang merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah, sebagai tesis dari sistem sentralistik yang dijalankan Rezim Orde Baru itu menjadi bagian dari tuntutan Reformasi atau bukan.

Pembaca yang budiman, tentu saja Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan masuk dalam perdebatan tersebut. Sebagai pelaksana UU, KPU hanya memastikan siap melaksanakan amanah UU itu. Namun demikian, sebagai wacana ilmiah dan akademik, KPU juga patut merekam wacana ini, sehingga di lapangan, semua penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga KPSS bisa memahami ruh dan konteks setiap UU. Pemahaman akan ruh dan konteks UU ini sangat berarti dalam hal penyelenggaraan pemilihan sehingga bisa mendekati yang ideal dan terbaik.

Dengan dasar itu, redaksi akan menghadirkan kembali persoalan pemilihan gubernur, bupati dan walikota ini. Dan tentu saja, harapan ke depan, proses demokrasi di Indonesia semakin terkonsolidasi, sehingga wujud demokrasi yang benar-benar ideal benar-benar terwujud. Selamat membaca!



Poster dukung Pilkada Langsung

Antara Perppu, DPR dan KPU

Mekanisme pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi isu paling banyak dibicarakan bulan-bulan terakhir; apakah kepala daerah itu tetap dipilih langsung oleh rakyat, atau dikembalikan lagi ke DPR.

SUARA KPU. Perdebatan tentang mekanisme pemilihan gubernur, bupati dan walikota terus mencuat. Isu ini mencuri perhatian publik seiring dengan perubahan kerangka hukum yang sangat dinamis dari UU nomor 22 tahun 2014 menjadi Perpu nomor 1 tahun 2014. Perdebatan tentang mekanisme makin meluas, tidak lagi sebatas membahas dikotomi politik elektoral semata, mekanisme pemilihan yang bersifat langsung ditentukan dengan bermakna Pancasila yang berdasarkan pemusyawaratan dan perwakilan.

Karena itu, perdebatan ini sangat menarik, dan bukan hanya melibatkan pakar hukum tatanegara melainkan juga para pakar politik. Lebih-

lebih isu ini juga mengajak publik menengok kembali beberapa tahun lalu; apakah pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah, sebagai tesis dari sistem sentralistik yang dijalankan Rezim Orde Baru itu menjadi bagian dari tuntutan Reformasi atau bukan.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama

kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pada tahun 2011, terbit UU baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu UU 15/2011. Di dalam UU, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

UU itu juga menyebutkan bahwa

pemilihan gubernur-wakil gubernur diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan pemilihan bupati-wakil bupati atau walikota-wakil walikota diselenggarakan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Aceh, pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Berdasarkan UU 32/2004, peserta pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan UU 12/2008 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan kepala daerah dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi

(MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pemilihan kepala daerah dalam UU 32/ 2004. Khusus di Aceh, peserta pemilihan kepala daerah juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.

Hal yang menjadi perdebatan adalah RUU Pilkada yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri. RUU ini sudah sejak 2010 disiapkan, dan sesuai kesepakatan antara Komisi II DPR dengan Kemendagri, RUU Pilkada akan diselesaikan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2014. Dengan demikian pilkada pasca-Pemilu 2014 sudah menggunakan UU baru.

Naskah akademik RUU Pilkada menyebutkan tiga tujuan. Pertama, memberikan arahan dalam penyusunan norma-norma pengaturan dalam Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kedua, menyelaraskan pengaturan norma dalam UU sesuai dengan norma akademis, teoritis dan yuridis. Ketiga memberikan penjelasan mengenai kerangka pikir dan tu-

juan norma-norma pengaturan dalam UU tentang pemilihan gubernur dan bupati/walikota.

RUU Pilkada ini terdiri atas 7 bab dan 181. Dalam RUU ini terdapat dua ketentuan baru yang berbeda secara signifikan dari ketentuan UU 32/2004. Pertama, pilkada hanya memilih gubernur dan bupati/walikota, sementara wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota ditunjuk dari lingkungan PNS. Kedua, gubernur dipilih tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD provinsi.

Perdebatan paling alot adalah terkait dengan mekanisme pemilihan. Beberapa partai politik, seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mau pilkada dikembalikan lagi ke DPRD. Sebab, dalam pandangan mereka, terlalu banyak mudharat bila dilakukan oleh rakyat langsung.



Pimpinan KPU dan Bawaslu menggelar konferensi pers tentang kesiapan pelaksanaan pilkada langsung dan serentak.

Bagi partai-partai ini, mekanisme pemilihan kepala daerah yang diwacanakan dalam RUU Pilkada tak melanggar konstitusi, dan justru sesuai cita-cita founding fathers yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dan sesuai UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis.

Mereka juga menilai, selama sembilan tahun pelaksanaan Pilkada langsung terbukti membuat politisi menjadi kutu loncat, memanfaatkan parpol sebagai tunggangan sesaat dan berkongsi dengan para bandar dan mafia. Akibatnya, ketika terpilih tak pernah memperhatikan rakyat, pembangunan daerah terbengkalai, konflik sosial pasca Pilkada terjadi hampir disemua lapisan masyarakat.

Belum lagi ditambah korban jiwa akibat kerusuhan dan waktu yang habis terbuang hanya untuk proses politik yang tak sehat. Sehingga dari catatan Kemendagri dan KPK, 545 Pilkada, sebanyak 330-332 kepala daerah terpilih terjerat korupsi.

Dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD, mereka yakin bisa meminimalisir konflik social, dan di saat yang sama kepala daerah terpilih (eksekutif) bisa langsung fokus bekerja mem-

bangun daerah bersinergi dengan DPRD (legislatif). Sementara, fungsi yudikatif baru pengawasan dan civil society bertugas mengawasi.

Kelompok ini berpandangan Pilkada oleh DPRD meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik dan meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah yang memiliki program serta rencana pembangunan yang jelas untuk daerahnya. Pilkada oleh DPRD diyakini bisa meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah berkompeten yang tidak memiliki modal besar.

Pilkada oleh DPRD dinilai akan mengurangi risiko terpilihnya kepala daerah hasil manipulasi pemungutan

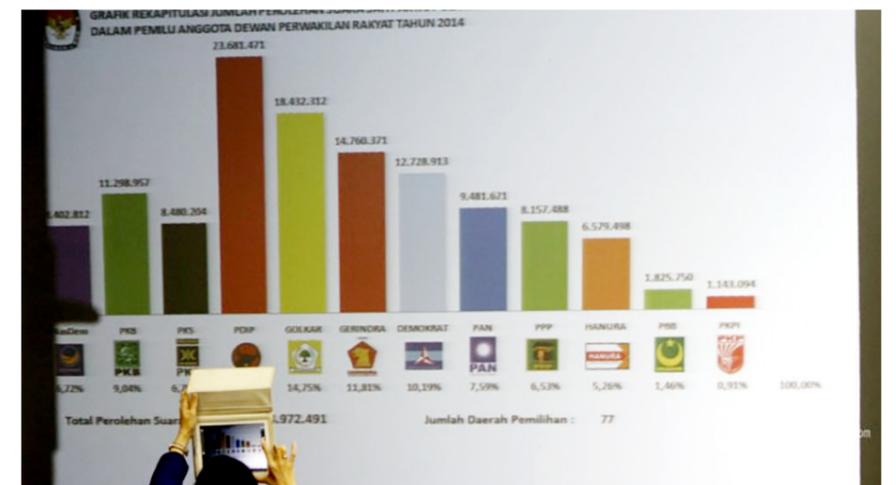
suara, seperti penggunaan daftar pemilih palsu, perubahan hasil rekapitulasi suara dan kecurangan penghitungan suara lainnya. Selain itu, pilkada oleh DPRD mengurangi jumlah kasus korupsi anggaran daerah oleh kepala daerah untuk mengembalikan biaya kampanye yang berasal dari modal pribadi.

Sementara itu, berseberangan dengan kelompok tadi, partai yang mau tetap Pilkada langsung oleh rakyat adalah PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hanura.

Bagi kelompok kedua ini, Pilkada melalui DPRD tidak sesuai mandat demokrasi. Sistem pemilihan tidak langsung itu dinilai tidak sesuai dengan makna demokrasi yang selama

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014

 1 Partai NasDem	 2 Partai Kebangkitan Bangsa	 3 Partai Keadilan Sejahtera	 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	 5 Partai Golongan Karya
 6 Partai Gerakan Indonesia Raya	 7 Partai Demokrat	 8 Partai Amanat Nasional	 9 Partai Persatuan Pembangunan	 10 Partai Hati Nurani Rakyat
 11 Partai Damai Aceh	 12 Partai Nasional Aceh	 13 Partai Aceh	 14 Partai Bulan Bintang	 15 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia



Grafik rekapitulasi jumlah suara Pileg.

“Hasilnya ada 12 PKPU yang dibuat dengan bukan hanya merujuk pada Perppu Nomor 1 tahun 2014, tetapi juga dari banyak sumber,”

ini telah dijalankan.

Bagi mereka, dengan Pilkada tak langsung maka demokrasi dibajak elite politik. Karena itu, sejatinya, pilkada langsung dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi dan mandat rakyat. Pilkada langsung juga untuk mempertahankan kedaulatan rakyat di dalam pemilu.

Menurut mereka, pilkada langsung ini membedakan era reformasi dengan era orde baru dan rakyat menghendaki demokrasi langsung ini. Kalau pun ada efek negatif dari pilkada langsung seperti misalnya politik uang, itu masih bisa dikelola melalui penataan sistem pemilu secara keseluruhan.

Di sisi lain, pilkada langsung dipercaya bisa memunculkan sosok calon pemimpin alternatif yang mampu membawa bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Artinya, Pilkada langsung lebih memberi ruang munculnya kepemimpinan alternatif yang lebih baik.

Mereka juga berpandangan, pilkada melalui perwakilan DPRD adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusi warga masyarakat. Bahkan jika pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD maka tidak konsisten dengan bentuk pemerintahan negara kita.

Mekanisme pemilihan kepala daerah kita harus konsisten dengan pemilihan kepala negara atau pilpres. Karena Presiden dipilih secara langsung maka pemilihan kepala daerah harus disesuaikan dengan itu.

Mereka menilai pasal 18 UUD 1945 berbunyi secara demokratis, harus dilihat secara utuh, keseluruhan, dan jangan dinilai pasal demi pasal. Sebab ada pasal lain yang mengatakan



Kertas suara Pileg.

kalau dalam bentuk pemerintahan presidensial kepala negaranya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, maka itu tidak bisa dipisahkan dengan pemilihan kepala daerah.

Perdebatan dua kubu ini akhirnya diputuskan melalui sidang Paripurna DPR RUU Pilkada pada Jumat dinihari (26/9). Jumlah suara yang memilih opsi Pilkada langsung oleh rakyat sebanyak 135 orang anggota DPR. Sementara yang memilih opsi Pilkada lewat DPRD sebanyak 226 orang anggota DPR.

Habis Paripurna Terbitlah Perppu Hasil sidang Paripurna DPR yang cukup dramatis hingga Jumat dinihari itu dianulir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, dengan berbagai

perbaikan dari sistem Pilkada yang selama ini dianut berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 menghapus sejumlah kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara tidak langsung.

Ada beberapa pertimbangan Presiden SBY mengeluarkan Perppu tersebut. Pertama, untuk menjamin pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, sehingga kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Kedua, kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam poin pertama tadi perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan

mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan 2014.

Ketiga, UU 22/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa.

Kesiapan dan Skenario KPU

Perppu, sebagaimana disampaikan Hadar Gumay, harus diikuti oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Hadar pun memastikan, KPU akan tetap mempersiapkan Pilkada langsung 2015 dengan adanya Perppu. Hal yang lain mendasari KPU tetap mempersiapkan pemilihan kepala daerah langsung yaitu masa sidang DPR yang akan berlangsung sekitar bulan Januari-Februari 2015.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas, berharap tidak ada lagi kekisruhan di DPR agar dapat segera membahas soal Perppu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut. Bagaimanapun, ini terkait erat dengan dengan persiapan KPU untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak dengan baik.

“Apakah akan menolak atau menerima. Itu menyangkut pelaksanaan persiapan pemilu serentak oleh KPU,”



Hadar Nafis Gumay

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani Presiden SBY pada 2 Oktober itu mengamanatkan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak.

“KPU harus mempersiapkan diri sehingga waktu tidak terbuang. Jadi dengan apa kami berpatokan untuk bekerja tentunya dari UU (Perpu) yang berlaku. Sekiranya DPR tidak menyetujui silakan saja, kami harus mengubah lagi apa boleh buat,” kata Hadar.

ungkap Sigit.

la mengatakan persiapan untuk pemilihan kepala daerah sekitar 10 bulan. Jika disimulasikan Desember akan dilaksanakan pemilu, maka pada Februari harus sudah ketok terkait pengesahan apakah menolak atau

“KPU harus mempersiapkan diri sehingga waktu tidak terbuang. Jadi dengan apa kami berpatokan untuk bekerja tentunya dari UU (Perpu) yang berlaku. Sekiranya DPR tidak menyetujui silakan saja, kami harus mengubah lagi apa boleh buat,”

“Kalau ditolak, jadi persiapan kita, tidak ada persiapan. Cukup diam,”

menerima Perppu.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah paling ideal dilaksanakan pada September 2015. Sehingga, awal tahun 2015 sudah bisa dimulai tahapan persiapannya. Setidaknya, terdapat beberapa hal yang harus disiapkan KPU. Diantaranya menyangkut regulasi, standar calon, barang dan jasa, rekapitulasi.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini regulasi terkait pemilihan kepala daerah tengah dibahas di internal KPU. Selain menyangkut persiapan regulasi KPU, KPU di daerah juga harus mempersiapkan anggaran untuk pemilihan kepala daerah.

Menurut Sigit, pemilihan serentak yang digelar pada 2015 berbeda dengan pemilu pada 2018 mendatang. Pada 2018 mendatang, anggaran pemilihan kepala daerah diambil dari APBN. Sedangkan anggaran pemilihan kepala daerah pada 2015 diambil dari daerah. Menyangkut anggaran tersebut, ia mengatakan itu harus dibahas KPU daerah dengan berkomunikasi dengan DPRD.

Sementara itu, menurutnya, pemerintah sendiri harus merevisi undang-undang yang berkaitan dengan standar pembiayaan. Karena standar yang pernah ada tidak sesuai lagi menyangkut besaran dan jumlah waktu yang boleh dialokasikan dalam penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi menurutnya, pada intinya apapun keputusan DPR, KPU harus bersiap-siap untuk tahapan persiapan pemilihan gubernur, bupati dan wakilota tersebut.

KPU sendiri menyiapkan dua opsi untuk menghadapi kemungkinan diterima atau ditolaknya Perppu tersebut. Jika diterima, KPU akan menindaklanjuti Perppu. Selanjutnya, KPU akan mempersiapkan terkait pengaturan dana kampanye, rekap calon, pencoblosan, dan lain sebagainya.

Bila Perppu ditolak oleh DPR, maka KPU tidak mengadakan persiapan untuk pemilu. Karena menurutnya, panitia pemilihan kepala daerah berisikan perwakilan fraksi dari DPRD. “Kalau ditolak, jadi persiapan kita, tidak ada persiapan. Cukup diam,” katanya.

Sementara ini, KPU menerbitkan surat

edaran (SE) kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk menindaklanjuti Perppu tersebut. Melalui surat edaran itu, KPU memerintahkan KPU provinsi dan kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati dan wakilota tersebut untuk melanjutkan tahapan pemilu.

Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, penerbitan SE ini hal yang normal. Sehingga juga KPU di daerah sudah bisa mempersiapkan jauh-jauh hari, dan sudah bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar anggaran pemilihan kepala daerah langsung itu tetap ada dalam 2015. SE itu juga akan menjelaskan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota apa yang menjadi kebijakan KPU pasca penerbitan Perppu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilota tersebut oleh Presiden beberapa waktu lalu.

Untuk itu, lanjutnya, KPU juga akan melakukan pembahasan pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri, akademisi dan penggiat pemilu. Pembahasan, menyangkut hal-hal yang diatur dalam Perppu seperti uji publik calon kepala daerah, kampanye yang difasilitasi penyelenggara pemilu dan pemungutan suara serentak.

Husni juga mengungkapkan KPU sudah mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) untuk mendukung pemilihan kepala daerah serentak 2015 apabila jadi dilaksanakan. PKPU tersebut dibuat berdasarkan Perppu Nomor 1 tahun 2014.

“Hasilnya ada 12 PKPU yang dibuat dengan bukan hanya merujuk pada Perppu Nomor 1 tahun 2014, tetapi juga dari banyak sumber,” ujar dia.

Pembuatan PKPU dilakukan secara hati-hati, karena harus terintegrasi dengan Perppu yang ada. “Ini bertujuan agar tidak seperti yang



Komisioner KPU Sigit Pamungkas memberikan pengarahan tentang penyusunan desain dan slogan sosialisasi Pemilu 2014.

“Apakah akan menolak atau menerima. Itu menyangkut pelaksanaan persiapan pemilu serentak oleh KPU,”

sudah-sudah, terjadi tumpang tindih antar peraturan,” kata Husni.

Sebagai tindak lanjut atas Perppu tersebut, KPU mulai menyusun beberapa Peraturan KPU (PKPU) terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Untuk itu, KPU, bersama Bawaslu, siap menyelenggarakan pemungutan suara serentak bagi semua daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Perppu Nomor 1 tersebut.

“Sekiranya Pemilukada itu akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2015 di 188 daerah di tanggal, bulan, dan jam yang sama,”

terangnya.

Kata Husni, KPU dan Bawaslu telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti poin-poin yang ada di Perppu tersebut. Dalam kesiapan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, keduanya secara terpisah telah melakukan masing-masing tugas sesuai kewenangannya.

“KPU mulai dari Pemilu-nya, perencanaan sampai evaluasi. Sementara Bawaslu menyiapkan dari segi pengawasan atas proses rangkaian Pemilukada,” tuturnya.

Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan jika kesepakatan bersama dengan KPU harus bisa segera dilaksanakan. Menyangkut aspek yang ha-

rus melibatkan pemangku kepentingan lainnya, Bawaslu mengharapkan agar segera mendapatkan respons.

“Terutama menyangkut kepastian hukum dan penganggaran pilkada serentak 2015,” imbuh Muhammad.

KPU dan Bawaslu telah menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua lembaga itu menyepakati untuk segera menindaklanjuti perppu tersebut dan memulai tahapan persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada 2015.

Berikut poin-poin kesepakatan KPU dan Bawaslu:



Pilkada di Bali (Sumber: RumahPemilu.org)

POIN-POIN KESEPAKATAN KPU DAN BAWASLU

1. KPU dan Bawaslu memiliki pemahaman yang sama untuk menindaklanjuti Perppu 1/2014 dan Perppu 2/2014 sebagai payung hukum penyelenggaraan pilkada langsung.

2. Dalam persiapan yang dilakukan KPU dan Bawaslu, masing-masing melakukan apa yang menjadi kewenangannya. KPU menyiapkan dari sisi penyelenggaraan mulai dari perencanaan, rencana tahapan, hingga evaluasi.

Sementara Bawaslu menyiapkan dari segi pengawasan. Khususnya proses-proses yang akan dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan pilkada.

3. Dalam konteks bahwa pilkada akan dilaksanakan secara serentak, pada tanggal dan bulan yang sama mulai dari 2015. KPU sedang mempersiapkan waktu yang paling tepat untuk menyelenggarakan pemilihan serentak.

Dari diskusi yang berjalan, September kemungkinan paling tepat untuk pelaksanaan pilkada serentak.

4. Terkait pemungutan suara serentak, Bawaslu mengusulkan agar tanggal pemungutan suara ditetapkan terlebih dahulu. Setelah itu, rangkaian kegiatan pra, saat, hingga pasca pemungutan suara bisa disusun.

5. KPU dan Bawaslu memandang perlu dilakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait. Beberapa hal penting dari perppu

tersebut masih membutuhkan uraian penjelasan. Sehingga saat diimplementasikan tidak menimbulkan hambatan di lapangan.

6. KPU memandang perlu dilakukan koordinasi dengan kemendagri untuk memastikan pilkada yang akan digelar pada 2015. Sehingga bisa dipastikan gubernur, bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir sepanjang 2015.

Dalam catatan awal KPU, terdapat 240 kabupaten/kota dan tujuh provinsi yang menyelenggarakan pilkada pada 2014. Namun, jika mengacu pada perppu, pilkada 2015 hanya bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun itu. Sehingga jumlahnya berkurang menjadi 181 kabupaten/kota dan tujuh provinsi.

7. Terkait penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan dan penghitungan suara, KPU dan Bawaslu sepakat untuk dilakukan persiapan yang baik dan cermat. Agar penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat.

8. Tahapan persiapan penggunaan teknologi meliputi kegiatan kajian kelayakan, uji coba secara komprehensif sesuai kondisi geografis daerah yang bersifat inklusif. Setelah uji kelayakan dan uji coba dilakukan, baru dilakukan evaluasi apakah pemungutan elektronik dan rekapitulasi elektronik bisa digunakan.

9. Untuk menjalankan pilkada serentak, KPU dan Bawaslu memandang dibutuhkan dukungan pemerintah

dan DPR tingkat pusat. Begitu pula pemerintah daerah dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

10. Menyangkut kepastian hukum, KPU dan Bawaslu menyadari pelaksanaan perppu membutuhkan dukungan dari DPR. KPU dan Bawaslu mengharapkan DPR dapat merespons dalam kesempatan pertama agar payung hukum pelaksanaan pilkada segera mendapatkan kepastian.

11. Menyangkut kepastian anggaran, KPU dan Bawaslu melihat hingga saat ini belum ada akomodasi untuk pelaksanaan pilkada serentak pada 2015. KPU dan Bawaslu membutuhkan anggaran untuk melakukan supervisi dan monitoring pilkada serentak 2015.

12. KPU dan Bawaslu di daerah juga membutuhkan kepastian anggaran di setiap daerah. Karena perppu mengamanatkan pelaksanaan pilkada langsung. Artinya, anggaran harus disesuaikan dengan perppu 1/2014. KPU dan Bawaslu di daerah diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan RAPBD 2015 telah mengakomodasi pelaksanaan pilkada langsung pada 2015.

13. KPU dan Bawaslu sepakat semua hal yang menjadi kelebihan pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2014 akan diadopsi dalam pilkada 2015. Terutama menyangkut keterbukaan dan transparansi dalam setiap tahapan yang berlangsung. [tim]

“KPU mulai dari Pemilu-nya, perencanaan, sampai evaluasi. Sementara Bawaslu menyiapkan dari segi pengawasan atas proses rangkaian Pemilukada,”



IDA BUDHIATI

Kita Siap Pilkada Langsung dan Serentak

“Apapun putusannya, KPU siap melaksanakannya. Kalau langsung, kita sudah siap, KPU sudah menyusun regulasi. Kalau ada perbaikan dari aspek teknisnya, tentu kami bisa langsung bekerja untuk menyusun.”

SUARA KPU. Meski Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota belum dibahas DPR, aktivitas KPU dalam mempersiapkan rekrutmen kepemimpinan eksekutif di daerah tidak lantas berhenti. Sejumlah draft peraturan untuk pelaksanaan tahapan demi tahapan pemilihan tengah digodok dan kini hampir rampung. Beberapa skenario

pemungutan suara pun tengah dimatangkan. KPU tak ingin kelimpungan. Ketika politisi di DPR memutuskan menerima Perpu sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Apa saja yang tengah dipersiapkan KPU dan bagaimana mereka menyikapi kemungkinan dinamika pembahasan

Perpu di DPR, berikut wawancara Suara KPU dengan Komisioner KPU RI yang membidangi hukum dan pengawasan Ida Budhiati.

Perppu pilkada saat ini belum masuk pembahasan di DPR, dan baru akan mulai dibahas bulan Januari mendatang. Selama masa itu,

persiapan apa saja yang dilakukan KPU untuk menyelenggarakan pilkada serentak tahun depan, baik secara aturan ataupun logistik?

KPU memahami Perppu itu sebagai hukum positif yang bisa digunakan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Kemudian KPU sesuai dengan wewenang yang ada dalam Undang-undang penyelenggara maupun dalam Perppu diberikan tugas dan wewenang untuk menyusun peraturan di bawah Undang-undang. KPU saat ini menyusun peraturan, sudah dilakukan dan tenggat waktunya pada akhir Desember sudah bisa selesai arah kebijakan KPU sehingga bisa disampaikan ke KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Apakah penyusunan regulasi tersebut juga dikonsultasikan ke DPR?

Tentu saja. KPU mengkonsultasikannya bulan Januari nanti.

Bagaimana persiapan KPU bila Perppu tersebut nanti diterima DPR?

Apapun putusannya, KPU siap melaksanakannya. Kalau langsung, kita sudah siap, KPU sudah menyusun regulasi. Kalau ada perbaikan dari aspek teknis ya tentu kami bisa langsung bekerja untuk menyusun.

Bagaimana bila putusan DPR menolak Perppu tersebut?

Kita tidak perlu berandai-andai. KPU bekerja sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Bagaimana sikap politik dari DPR ya kita lihat. Pada prinsipnya, KPU siap melaksanakan pemilihan kepala daerah. KPU sudah memiliki kesiapan, regulasi sudah dibuat dan disusun, kalau kemudian ada perubahan teknis untuk menyempurnakan Perppu ya kami juga siap untuk segera memperbaiki dan menyesuaikan.

Apakah pandangan Anda soal pemilu kepala daerah serentak? Apakah hal itu dinilai menyulitkan atau

justru sebaliknya?

Kesulitan KPU sebenarnya terkait dengan manajemen waktu, dari sisi persiapan KPU menyusun regulasi kemudian sosialisasi, dan bukan pada faktor pemilukada serentak.

Pemilukada serentak menurut saya, ini kan sudah digagas sejak lama dengan dasar lebih efisien dan lebih *manageable* (dikelola). Tapi problemnya, hukum positifnya itu diterbitkan dan kami harus segera bekerja untuk menyelenggarakan. Sementara penyelenggara memiliki kebutuhan untuk menyiapkan diri untuk menyusun regulasi dan melakukan



Komisioner KPU Ida Budhiati memberikan keterangan persiapan pilkada serentak pada wartawan.

sosialisasi.

Semisal pada pemilu legislatif kemarin KPU kok kesannya terlambat membuat regulasi, sosialisasinya juga seperti itu. Sebetulnya ini bukan mau KPU, tapi memang situasinya seperti itu. Bukan diburu waktu tapi memang antara penyelenggaraan dengan pelaksanaannya terlalu mepet.

Perppu itu kan disahkan bulan Oktober. Kemudian KPU harus mendesain pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.

Berapa waktu yang dimiliki KPU untuk menyusun regulasi dan melakukan sosialisasi?

Jadi nanti bila regulasinya mepet dengan tahapan pelaksanaan dan sosialisasinya ya jangan disalahkan KPU. Karena memang situasi dan kondisi yang memaksa KPU untuk seperti itu.

Apa yang dilakukan KPU untuk bisa menyesuaikan kerja dengan batasan waktu tersebut?

Kami sudah bekerja dengan waktu yang limitatif dan kami berusaha sekeras mungkin untuk bisa melaksanakannya.

Sejauh ini, bagaimana sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan KPU pusat dengan KPU di daerah?

Sambil menunggu peraturan KPU, kami meminta mereka (KPU daerah) untuk menyiapkan anggaran berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Kemudian tanpa harus menunggu peraturan KPU, mereka juga sudah bisa menyusun draft peraturan terkait dengan norma yang tidak ada perubahan. Sambil juga menunggu kebijakan dari KPU.

Apakah harapan Anda pada DPR yang akan membahas Perppu ini pada Januari mendatang?

Harapan tentu ada. Lebih cepat lebih baik untuk memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan pilkada ini.

Kemarin KPU sudah melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi II DPR. Saya memahami bahwa sebenarnya spirit dari pimpinan dan anggota Komisi II itu, mereka mempunyai political will untuk memprioritaskan pembahasan Perppu Nomor 1 tersebut dan target mereka adalah bulan Januari. [yan]

DR. SODIKIN

DPR Percepat Pembahasan Perppu Demi Kepastian Hukum



“DPR harus secepatnya membentuk dan membahas Perppu itu apakah akan disetujui atau bagaimana nasibnya. Agar KPU, bisa segera mempersiapkan langkah-langkah untuk pemilihan kepala daerah.”

SUARA KPU. Perdebatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bukan hanya melibatkan aktor politik, melainkan juga menjadi wacana di kalangan intelektual. Perdebatan akademik ini melibatkan sejumlah pakar tatanegara maupun para pakar politik.

Inilah wawancara Suara KPU dengan Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sodikin:

Perppu pilkada saat ini belum dibahas di DPR, menurut Anda, apa yang seharusnya KPU persiapkan baik secara aturan ataupun logistik sambil menunggu perppu dibahas dan diputuskan nanti?

Ini bukan hanya masalah KPU tapi juga masalah negara secara keseluruhan. KPU sebagai badan yang bertugas menyelenggarakan pemilu kan perlu ada aturan yang tegas. Sedangkan aturan tersebut dibentuk oleh pemerintah bekerjasama dengan DPR. Selama belum ada putusan dari DPR soal nasib Perppu tersebut, saya rasa tidak banyak yang bisa dilakukan KPU selain menunggu. Karena KPU dalam menjalankan tugasnya memerlukan dasar hukum. Kalau dasar hukumnya belum jelas kan bagaimana.

Menurut saya, DPR harus secepatnya membentuk dan membahas Perppu itu apakah akan disetujui atau bagaimana nasibnya agar KPU bisa segera mempersiapkan langkah-lang-

kah untuk pemilihan kepala daerah.

Dengan kata lain, menurut Anda, KPU tidak memiliki banyak ruang gerak selama nasib Perppu belum diputuskan oleh DPR?

Iya, jadi KPU tidak bisa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah kalau belum ada aturan yang pasti. Antara Perppu atau UU Pilkada Nomor 22 tahun 2014 yang akan digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bila dasar hukumnya belum pasti, KPU sulit untuk menyelenggarakannya.

Jadi sekarang bolanya ada di DPR, apakah mau menyetujui Perppu atau menolak Perppu. Kalau DPR menolak Perppu, berarti UU nomor 22 tahun

DPR harus secepatnya membentuk dan membahas Perppu itu apakah akan disetujui atau bagaimana nasibnya agar KPU bisa segera mempersiapkan langkah-langkah untuk pemilihan kepala daerah.

2014 itu yang akan diberlakukan dan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Kalau disetujui, Perppu nantinya akan menjadi rancangan undang-undang dan pemilihan umum kepala daerah tetap langsung.

Menurut Anda, bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh KPU menjelang putusan perppu di DPR?

KPU saat ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelenggarakan pemilu karena dasarnya belum ada. KPU mungkin hanya bisa menyarankan DPR untuk segera membahas perppu ini.

Kalau misalkan putusnya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dan serentak, KPU tidak perlu banyak persiapan logistik atau aturan, karena selama ini kan telah terbiasa menggelar pemilihan umum langsung. Cuma yang harus dipersiapkan bila perppunya ditolak, maka

UU nomor 22 tahun 2014 yang diberlakukan, dengan kata lain pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD.

Bagaimana pandangan Anda soal pemilihan umum kepala daerah secara langsung dan serentak yang diprediksi bisa lebih efisien?

Saya sebagai akademisi melihat pemilihan kepala daerah bila didasarkan pada Undang-Undang Dasar tidak masuk cakupan pemilu. Jadi menurut saya lebih baik pemilihan kepala daerah diserahkan saja kepada daerahnya masing-masing dan ini masuk kepada otonomi daerah.

Ada daerah yang mungkin bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, ada juga yang tidak langsung, atau melalui sistem apa yang sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Tidak usah dipaksakan untuk pemilihan langsung semua. Karena UUD pasal

18 ayat 4 tidak menjelaskan kepala daerah dipilih langsung atau melalui DPRD, tapi secara demokratis.

Nah, demokratis itu sendiri kan tidak mesti secara langsung atau melalui DPRD, tapi bisa melalui cara lainnya. Tapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak bisa saja asalkan ada peraturannya yang jelas. Karena hal itu bisa menjadi salah satu alternatif demi menghemat biaya.

Menurut Anda, bagaimana DPR harus bersikap dalam membahas Perppu ini?

DPR secepatnya lah membahas dan memutuskan, tidak boleh menunda-nunda agar ada kepastian bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kasihan KPU sebagai penyelenggara membutuhkan dasar hukum untuk melaksanakan tugasnya. [yan]

“KPU saat ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelenggarakan pemilu, karena dasarnya belum ada. KPU mungkin hanya bisa menyarankan DPR untuk segera membahas perppu ini.”



Dr. SODIKIN, S.H., M.H., M.Si

Lahir: di Indramayu, 10 Mei 1968

Agama: Islam

Alamat: Jl. Tumenggung Wiradireja No. 74 Rt 03/06 Kb Awi Cimahpar Bogor Utara Kota Bogor.

Pendidikan:

- SD, SMP, SMA di Indramayu lulus Sarjana Hukum/S1 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah di Jakarta (1993)
- Lulus S2 Magister Hukum dari PPS Magister Hukum Universitas Muhammadiyah di Jakarta (1998)
- Lulus S2 Magister Ilmu Lingkungan dari PPS Universitas Indonesia tahun 2006
- Lulus S3 Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2013.
- Pernah mengikuti Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan (SUSCADO-SWAR) XLV di Lemhannas, 2001.

Pekerjaan

- Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 1994 sampai

sekarang, dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jabatan

- Jabatan dalam struktural adalah Ketua Bagian Hukum Tata Negara FH UMJ periode 2012 -2016
- Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor periode 2007 - 2012, dan sekarang diberi amanah sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah Banten periode 2014 - 2017. Karya tulis yang berupa penelitian dan tulisan yang dimuat dalam jurnal ilmiah serta buku yang diterbitkan secara nasional, selain itu, juga menulis artikel di harian lokal di Bogor dan penyuluhan hukum dengan tema sekitar pemerintahan, pemilu dan lingkungan hidup.



Politik Uang Timbulkan permasalahan Bangsa **TOLAK!**



Sukses Pemilu 2014

JURI ARDIANTORO

Mengawal Pemilu Sejak Dulu

Aktifitas kepemiluan bukan hal yang baru bagi Juri Ardiantoro. Ibarat daging dengan tulang, yang tak bisa dipisahkan. Juri telah mengawal pemilu sejak Orde Baru. Di era reformasi, Juri masuk menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemilu dengan satu tekad, memperbaiki kualitas demokrasi.



SUARA KPU. Menjelang Pemilu 1997 itu, banyak pihak sudah mengingatkan agar Soeharto tidak lagi mau dicalonkan atau mencalonkan diri. Situasi dan kondisi politik saat itu memang terasa lain, bila dibandingkan Pemilu sebelumnya. Jari-jari kekuasaan Soeharto, meski sedang berada di puncak, terasa mulai goyah. Bahkan perlawanan kepada rezim mulai secara terangan-terangan dilakukan melalui jalur partai politik.

Paling tidak, pada 1996, muncul dua partai politik yang membuat gerah Orde Baru. Partai Rakyat Demokra-

tik (PRD) yang dibentuk kalangan muda, dan saat itu dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko (Kini Budiman menjadi anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan). Kedua, adalah Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) yang dipimpin seorang mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga intelektual yang belajar di Jerman, Sri Bintang Pamungkas.

Di luar perlawanan secara terang-terangan, banyak kelompok civil society yang mulai mengawasi pemerintahan Soeharto. Pengawasan itu bahkan dimulai sejak 1996, ketika Pemilu 1997 sedang dipersiapkan.

Untuk kali pertama secara massif dalam sejarah Orde Baru, Pemilu 1997 mendapat pengawasan yang ketat dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun kelompok civil society lain yang dibentuk oleh jaringan aktivis maupun organisasi massa non-pemerintahan.

Di antara salah seorang yang ikut mengawasi Pemilu 1997 itu adalah Juri Ardiantoro. Saat itu, pria kelahiran Brebes pada 6 April 1973 masih terbilang muda. Usianya masih sekitar 24 tahun. Namun demikian, semangat dia untuk memperjuangkan demokrasi melalui proses Pemilu

begitu kuat.

Saat itu, pada periode 1996-1997, Juri juga tercatat sebagai Sekretaris Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur. Posisi ini ia jabat setelah aktif di PMII sejak kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII IKIP Jakarta.

Diketahui, PMII bukanlah organisasi yang baru lahir. Organisasi ini tumbuh dan besar sejak era Presiden Soekarno. PMII merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik.

PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. PMII lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman, diantaranya carut

BIOGRAFI

Nama: Juri Ardiantoro

Pendidikan:

- SD Negeri 1 Lengkong Brebes, 1980-1986
- SMPN 2 Brebes, 1986-1989
- SMAN 1 Brebes, 1989-1992
- S1 Pend. Sejarah IKIP Jakarta, 1992-1999
- S2 Sosiologi Universitas Indonesia, 2000-2003,
- Mahasiswa Program Ph.D. (Doctor) Sosiologi pada Departement of Anthropology and Soicology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Malaysia, 2006 – sekarang

Karir:

- Dosen Sosiologi Pariwisata pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 2005 – sekarang.
- Interviewer pada Institute for Policy and Communication Studies (IPCoS), 1999
- Redaktur Jurnal ARIEF, PP Ma'arif NU, 2000
- Peneliti pada Yayasan DEWA Indonesia, 1999-sekarang
- Dewan Redaktur Jurnal PROGRESIF, 2001
- Konsultan pada Proyek Pembentukan Forum Musyawarah Masyarakat Kelurahan di DKI Jakarta, Kerja sama Jakarta Empowering Society (JES) dengan Biro Pemberdayaan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta, September-Desember 2002
- Associate Research pada Pusat Kajian Komunikasi FISIP UI, November 2002-2003
- Associate Research pada Lab. Sosio, Departemen Sosiologi FISIP UI, November 2002-2003
- Fasilitator pada Konsultasi Publik dan Lokakarya pada Proyek Membangun Kemitraan dan jejaring kerja dalam penataan ruang. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Nasional Depkimpraswil dengan pusat kajian Komunikasi Universitas Indonesia, September-Desember 2002



“Bagi Juri, pendidikan juga sangat penting dalam mengisi konsolidasi demokrasi.”

marutnya situasi politik bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959 dan tidak menentukannya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada.

Tak heran, semangat dan ruh Juri untuk mengawal pemilu begitu berkobar sebab tumbuh dan besar di lingkungan organisasi sebesar PMII. Selain aktif di PMII, Juri Ardiantoro juga pernah menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah IKPI Jakarta periode 1994-1995. Ia pun tercatat sebagai anggota dewan redaksi majalah kampus DIDAKTIKA periode 1995-1997.

Bagi Juri, pendidikan juga sangat penting dalam mengisi konsolidasi demokrasi. Maka sejak 1997 sampai tahun 2000. Juri juga mengajar di SMU IKIP Jakarta untuk pelajaran Sosiologi. Kemudian menjadi dosen di FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Bung Karno, mata kuliah Pembangunan Partisipasi Masyarakat, Komunikasi Politik, Teori Perubahan Sosial, dan Sistem Sosial Budaya Indonesia pada 2001-2003. Terakhir, sebagai dosen Sosiologi Pariwisata di Universitas Negeri Jakarta sejak 2005 hingga saat ini.

Kembali ke persoalan Pemilu, dengan

masih terlibat di dunia pendidikan, pada tahun 1999, Juri juga mengkoordinir kegiatan pelatihan Trainer for Trainer (TFT) untuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Berdiri pada akhir bulan Januari 1996, KIPP merupakan gabungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan individu-individu yang menginginkan pelaksanaan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil pada tahun 1997. Kehadirannya disambut positif oleh banyak kalangan, terutama kaum akademisi, serta pers.

Dari pengalaman mengajar dan aktivitasnya yang banyak bersentuhan dengan dunia sosial masyarakat, tidak mengherankan bila studi S-2-nya mengambil jurusan Sosiologi di Universitas Indonesia pada 2000-2003 dan Program Ph.D (doktor) Sosiologi pada *Departement of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Malaysia*.

Juri tercatat sebagai Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2013, sebelum akhirnya menjadi anggota KPU RI periode 2012-2017. [wid]

Pakar ini lahir di lingkungan desa di Solok, Sumatera Barat. Hidupnya sejak kecil sudah ditempa dengan semangat membaja dan bekobar-kobar. Semangat dan kerja keras itulah yang mengantar anak kampung ini menjadi pakar hukum tatanegara yang ternama dan berkelas.



SALDI ISRA

Anak Kampung yang Jadi Pakar Ternama

SUARA KPU. Dialah Saldi Isra. Untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Saldi harus memeras keringat. Saat mahasiswa, ia misalnya nyambi dengan mengajar di Madrasah Aliyah di Panningahan, Solok. Maka pada akhir pekan, Saldi harus rela bolak-balik Padang-Solok sejauh 100 kilometer, dengan menggunakan bus umum.

Sejak mahasiswa, di tengah keterbatasan, Saldi pun sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Pada tahun ketiga kuliah, dia mendapat beasiswa dan pada 1995 lulus dengan predikat *summa cum laude*. Pilihan jurusan hukum tata negara membuat Saldi merasa beruntung. Selain para ahli tata negara sangat terbatas, juru-

san ini memberinya keleluasaan untuk mengembangkan pemikiran.

Dia juga rajin menerbitkan buku dan menulis di media massa. Dari tulisan-tulisan itulah, dia muncul sebagai pemikir hukum tata negara yang menonjol di Tanah Air. Pria kelahiran Panningahan Solok pada 20 Agustus 1968 ini mengambil kuliah program master di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian program doktor di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, lulus tahun 2009. Tak lama setelah lulus, kini dia menjadi profesor hukum tatanegara di Universitas Andalas.

Selain konsen pada hukum tatanegara secara umum, Saldi juga sangat

memberi perhatian pada persoalan Pemilu, konsolidasi demokrasi dan isu pemberantasan korupsi. Perhatiannya pada Pemilu ini disampaikan dalam bentuk tulisan maupun dalam ragam kesempatan dialog. Perhatian Saldi pada isu lintas bidang ini menunjukkan karakter Saldi yang terbuka dan egaliter.

Posisi dan sikap Saldi terhadap pemilu cukup banyak mengacu pada disertasinya soal tata lembaga negara: Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Secara mendasar, anggota tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu 2012-2017 ini menyatakan bahwa perubahan radikal pasca reformasi terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal

20 ayat (1) UUD 1945 mengurangi secara signifikan kekuasaan Presiden dalam membuat undang-undang. Sementara dalam salah opininya ia menegaskan bahwa salah satu penyebab mendasar politik uang di pemilu dan korupsi pemerintahan hasil pemilu karena permasalahan tata lembaga negara.

Saldi berpendapat, pemurnian sistem presidensial penting dilakukan. Penguatan posisi DPR dalam proses legislasi harus diikuti pemberian kewenangan kepada Presiden untuk melakukan veto. Saat rumusan normatif UUD harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, dominasi DPR dalam legislasi akan sulit dibendung.

Secara ontologis Saldi menganalisa, trauma executive heavy rezim Orde Lama dan Orde Baru malah menjadikan partai sebagai pusat sistem politik yang memperkuat posisi DPR. Dominasi parlemen di sistem presidensial berdampak pada superiornya partai sebagai penyuplai anggota DPR. Ini lah sebab kenapa pemilu hanya permainan kuasa partai.

Pemilihan pemerintah berkala bukan berdasar aspirasi rakyat melainkan kepentingan elite partai di DPR. Dengan posisi seperti itu, partai sangat mungkin menjadi kekuatan yang sulit dikontrol. Karena itu, tak tertutup kemungkinan partai politik terperangkap ke dalam postulat yang pernah dikemukakan Lord Acton: *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.*

Di tengah tata negara tak pantas tersebut Saldi mengarahkan agar pemilu mampu menghukum partai dan politisi yang menyelewengkan kewenangan. Tanpa itu, pemilu hanya menjadi sarana legitimasi baru politisi yang memperdagangkan dan mengabdikan amanah rakyat. Menurut Saldi, kerja-kerja ekstra membangun kesadaran kepada pemilih untuk memberikan dukungan (memilih) partai yang berpotensi berkembang ke arah yang lebih baik.

Untuk itu, kampanye yang bersifat masif dan terstruktur diperlukan, terutama dalam menyampaikan jejak rekam partai dan caleg peserta

pemilu. Diperlukan kerja keras membukakan mata pemilih untuk tak lagi memilih partai yang telah berkhianat pada rakyat.

Banyak penghargaan yang diraih Saldi. Suami dari Leslie Annisaa Taufik ini meraih Megawati Soekarnoputri Award sebagai Pahlawan Muda Bidang Pemberantasan Korupsi (2012); Tokoh Muda Inspiratif versi Kompas (2009); Universitas Andalas (UNAND) Award bidang Penelitian (2007); Award of Achievement for People Who Make a Difference dari The Gleitsman Foundation, USA (2004); dan Bung Hatta Anti-Corruption Award (2004).

Mengenai Bung Hatta Anti-Corruption Award (2004), Saldi sebagai Koordinator Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), dinilai mampu membongkar praktik korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat sejak tahun 1999. Selain melakukan kajian tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dia juga menulis dan membuat buku tentang antikorupsi.

Sebagai dosen, Saldi diberikan peng-



hargaan Dosen Teladan II Universitas Andalas Tahun 2002; Dosen Teladan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2002; juga SCTV Award sebagai Dosen Favorit Universitas Andalas dalam Rangkaian Kegiatan SCTV Goes to Campus (2003).

Saat masih mahasiswa, Saldi menjadi Mahasiswa Berprestasi Utama Tingkat Nasional Tahun 1994; Mahasiswa Berprestasi Utama I Universitas Andalas tahun 1994; Mahasiswa Berprestasi Utama I Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 1994. Lalu, saat lulus di Maret 1995, Saldi menjadi Lulusan Terbaik (S1) Universitas Andalas dengan prediket Summa Cumlaude Wisuda.

Selain karya tulis opini yang banyak dimuat sejumlah media nasional dan lokal hingga kini, ayah dari Wardah Awwalin Ikhsaniah, Aisyah Afiah Izzaty dan Muhammad Haifan ini menulis buku di antaranya, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (2001); Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen (2002); Reformasi Hukum Tata Negara Pasca-Amandemen UUD 1945 (2006); Dinamika Ketatanegaraan di Masa Transisi, 2002-2005 (2006); dan Kekuasaan dan Perilaku Korupsi (2009).

Ada pun buku Saldi yang berkaitan dengan pemilu di antaranya, Kampanye dengan Uang Haram (2004); Hubungan Eksekutif-Legislatif Pas-

ca-Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (2005); Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia (2010); dan Membongkar Korupsi (2010).

Evaluasi Pemilu, KPU Terima Kritik dengan Terbuka



Pimpinan KPU dan Bawaslu memberikan pernyataan siap menerima masukan dan kritik atas penyelenggaraan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menerima masukan dan kritik atas penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, masukan dan kritik diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

SUARA KPU. KPU pun merasa berkewajiban melakukan evaluasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. Evaluasi bertujuan untuk mengukur dan menilai kesesuaian kinerja penyelenggara dengan kerangka hukum Pemilu. "Kami (KPU) secara kelembagaan sangat terbuka dengan masukan yang ada untuk jadi catatan penting bagi penyelenggaraan pemilu ke depan, agar masalah yang kemarin

terjadi bisa dihindari dan hal-hal baik bisa kembali digunakan," ujar Husni dalam pembukaan Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 KPU dengan KPU Provinsi Seluruh Indonesia di Batam, Rabu (22/10). Agar pelaksanaan evaluasi berlangsung efektif dan objektif, maka penilaian harus berdasarkan fakta dan catatan peristiwa yang terjadi

dalam setiap tahapan Pemilu. Husni mengatakan, catatan-catatan itu dapat muncul dari pihak internal penyelenggara pemilu di setiap tingkat, maupun dari pihak eksternal yaitu pemantau pemilu. Selain itu, KPU juga akan mencatat semua masukan publik yang muncul di media massa.

Pada Rabu 22 hingga Jumat 24 November 2014 lalu, KPU menggelar

rapat evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2014. Evaluasi penyelenggaraan Pemilu ini juga bukannya tidak mempunyai dasar hukum. Evaluasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Tujuan pelaksanaan evaluasi ini adalah memecahkan permasalahan dan menarik pelajaran dari hasil, manfaat, dan dampak dari semua kegiatan pemilu.

"Ini akan menjadi koreksi, tindak lanjut, dan rekomendasi bagi pimpinan KPU dalam penyusunan regulasi, perencanaan implementasi, dan penganggaran pemilu yang lebih baik di masa mendatang," tegasnya.

Pada satu kesempatan berbeda, Husni menyatakan ada beberapa kasus yang jadi bahan evaluasi KPU dan bisa diperbaiki dalam kesempatan Pemilu berikutnya. Ia mencontohkan, kasus surat suara tertukar cukup masif pada Pemilu 2004, tidak hanya terjadi antar provinsi tetapi juga terjadi antar pulau. Sementara pada Pemilu 2009, surat suara tertukar antar pulau berkurang, tetapi surat suara tertukar untuk tingkat regional masih cukup banyak.

Sedangkan pada Pemilu 2014, surat suara tertukar lebih banyak terjadi antara daerah pemilihan (Dapil) di kabupaten/kota yang sama. Untuk kasus surat suara tertukar antar dapil di tingkat provinsi dan pusat, jumlah sangat kecil.

Kegiatan evaluasi ini sangat membantu KPU merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu. Misalnya, dalam menangani kasus surat suara tertukar pada Pemilu 2009, KPU mengambil keputusan tidak menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Surat suara tertukar yang sudah tercoblos dihitung sebagai suara partai, padahal sistem Pemilu yang digunakan proporsional terbuka.

"Aturan inilah yang kita perbaiki pada Pemilu 2014. Jika terdapat surat suara yang tertukar kemudian tercoblos oleh pemilih, maka dilakukan PSU untuk menjamin hak setiap calon," ujarnya.

Husni juga memberikan catatan pada pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon pe-

serta Pemilu. Saat itu tim verifikator KPU sempat kelabakan menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan semua partai politik mendaftar dan mengikuti verifikasi ulang, termasuk partai politik hasil Pemilu 2009 yang lolos ke parlemen.

"Awalnya kita hanya mengatur waktu untuk melakukan verifikasi terhadap parpol di luar parpol yang lolos ke parlemen. Setelah putusan MK, semuanya wajib diverifikasi. Hal ini membuat petugas kita kelabakan. Kedepan, waktu untuk melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik perlu ditata ulang," ujarnya.

Pada tahapan Pemilu 2014 lalu, KPU pun menerima secara terbuka kritikan publik, akademisi dan pengamat politik terkait kerja sama antara pihaknya dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan data Pemilu 2014.

Kritikan tersebut menjadikan KPU lebih berhati-hati dalam menindaklanjuti MoU (kerjasama) ihwal keamanan data yang dimiliki KPU untuk pemilu 2014. [ald]



Ketua KPU Husni Kamil Manik sedang memeriksa kualitas kertas suara.

"Ini akan menjadi koreksi, tindak lanjut, dan rekomendasi bagi pimpinan KPU dalam penyusunan regulasi, perencanaan implementasi, dan penganggaran pemilu yang lebih baik di masa mendatang,"



Peserta rapat semangat mengikuti kegiatan Orientasi Tugas Penyelenggaraan Pemilu Gelombang IV.

KPU Gelar Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Gelombang IV

Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang amat besar kepada bangsa dan negara. Karena itu peningkatan kapasitas mereka merupakan hal yang wajib hukumnya dilakukan terus menerus secara internal.

SUARA KPU. Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang amat besar kepada bangsa dan negara. Karena itu peningkatan kapasitas mereka merupakan hal yang wajib hukumnya dilakukan terus menerus

secara internal.

Jelang akhir Oktober lalu, Sekitar 60 peserta dari 10 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, masing-masing lima komisioner dan sekretaris per provinsi, yang sudah dilantik namun

belum mengikuti orientasi, akhirnya mengikuti Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Gelombang IV tahun 2014.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, pada

“Berbeda dengan orientasi sebelumnya, yang dilaksanakan di tengah-tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014, orientasi kali ini berlangsung pada tahapan penyelesaian Pemilu 2014,”

Senin (27/10) dan berlangsung di Hotel Harris, Jl Engku Putri, Batam Center, Kepulauan Riau.

Husni Kamil Manik dalam sambutannya menerangkan, orientasi tugas ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tiga gelombang sebelumnya, yang telah terselenggara pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2013.

“Berbeda dengan orientasi sebelumnya, yang dilaksanakan di tengah-tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014, orientasi kali ini berlangsung pada tahapan penyelesaian Pemilu 2014,” kata Husni yang kala itu didampingi Komisioner KPU Sigit Pamungkas dan Wakil Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU Ismanto Eko Ariyanto.

Ia menambahkan, meski para peserta telah menjalankan tugas sebagai penyelenggara terlebih dahulu, namun pelaksanaan orientasi tugas ini tetap dipandang relevan. Ada tiga alasan penting yang dikemukakan Husni.

Pertama, materi orientasi ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis akan prinsip-prinsip dan standar pemilu yang demokratis. Plus, diperkaya pembekalan dari Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan pemilu.

“Hal ini penting guna melengkapi kondisi *‘learning by doing’* yang telah

dilakukan, sehingga KPU Provinsi dapat optimal dalam melakukan pembinaan kepada KPU Kab/Kota di wilayahnya,” imbuh Husni.

Alasan kedua, peserta diharapkan dapat bertukar pengalaman terkait dengan pelaksanaan pemilu di masing-masing daerah melalui kegiatan ini. Dengan begitu, dapat tercipta proses pertukaran gagasan/pengalaman antara Anggota KPU

si yang menjadi peserta orientasi saat ini, saya minta agar dapat memahami dengan komprehensif keseluruhan materi maupun metode pembelajaran yang digunakan, sehingga mampu melaksanakan kegiatan orientasi ini di provinsi masing-masing,” harap Husni.

Sementara itu, Wakil Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU Ismanto Eko Ariyanto, dalam laporan



Pidato Ketua KPU Husni Kamil Manik mendapat sambutan hangat peserta rapat.

Provinsi yang satu dengan yang lainnya.

Alasan ketiga, terkait kebutuhan untuk mereplikasi kegiatan orientasi tugas ini ke tingkat KPU Kabupaten/Kota.

“Untuk itu, para Anggota KPU Provin-

pembukaan pelaksanaan kegiatan menerangkan bahwa acara yang digelar selama lima hari, 27-31 November 2014, itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. [ald]

Pilkada Serentak, KPU Akan Gelar Rakor Dengan Kementerian Terkait

Terkait beberapa perubahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyadari perlunya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kementerian terkait lain dalam hal persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2015.



Pimpinan KPU dan Bawaslu kompak siap melaksanakan Perppu 1/2014.

SUARA KPU. Koordinasi diperlukan menyangkut beberapa hal krusial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Dalam kaitan penyusunan peraturan KPU dan Bawaslu mengenai pilkada serentak, KPU dan Bawaslu memandang perlu segera digelar rapat koordinasi dengan Kemendagri dan kementerian terkait karena dalam Perppu 1/2014 ada beberapa hal yang butuh penjelasan,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam keterangan persnya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).

Dia mengatakan, koordinasi itu harus dilakukan agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam pelaksanaan pilkada seperti diatur Perppu.

Setelah koordinasi dengan Kemend-

agri, diteruskan Husni, pihaknya akan melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah kepada gubernur, bupati dan walikota yang masa jabatannya akan berakhir pada 2015 mendatang.

Saat ini, KPU juga sedang membahas dan menyusun beberapa Peraturan KPU (PKPU) terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. PKPU tersebut nantinya akan dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah.

Senin 20 Oktober lalu, KPU dan Bawaslu sudah menggelar rapat bersama membahas tindak lanjut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pertemuan itu, di antaranya membahas beberapa hal baru dalam

penyelenggaraan pilkada yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Contohnya, penyelenggaraan pilkada serentak dan pemungutan dan rekapitulasi secara elektronik.

Dalam rapat itu, KPU dan Bawaslu telah memiliki kesepakatan dalam melaksanakan amanat Perppu 1/2014 dan masing-masing penyelenggara akan menyusun peraturan sesuai dengan kewenangannya.

Masih terkait dengan hal di atas, KPU mendata sebanyak 204 daerah otonomi akan menggelar Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak pada 2015. Selain daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir, 18 daerah otonomi baru juga akan menggelar Pilukada 2015. Ke-204 daerah tersebut terdiri dari 197 kabupaten/kota dan tujuh provinsi.

KPU sendiri mempertimbangkan tiga alternatif waktu penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ketiga alternatif itu adalah pemungutan suara serentak pada September, Oktober atau November 2015.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menyebutkan dalam exercise tiga alternatif itu, KPU juga memperhitungkan kemungkinan pemungutan suara putaran kedua tetap dilangsungkan pada 2015 atau tahun berikutnya, yaitu 2016. [ald]

“Dalam kaitan penyusunan peraturan KPU dan Bawaslu mengenai pilkada serentak, KPU dan Bawaslu memandang perlu segera digelar rapat koordinasi dengan Kemendagri dan kementerian terkait karena dalam Perppu 1/2014 ada beberapa hal yang butuh penjelasan,”

Sistem Informasi Pemilu Butuh Penyempurnaan

Teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu perlu terus disempurnakan. Teknologi informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu.

SUARA KPU. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menyiapkan format aplikasi yang lebih baik. Sejatinya, KPU sendiri ingin perbaikan sistem dan manajemen kepemiluan dari waktu ke waktu lewat evaluasi yang komprehensif.

“Salah satu pendekatan yang kami lakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk penyempurnaan, ke depan kami perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam rangka menyiapkan sistem dan format aplikasi yang lebih baik,” kata Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, saat membuka acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di Sanur Bali, Minggu (26/10).

Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut diikuti oleh 482 operator Sidalih dan Situng dari Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Kegiatan rapat gelombang II ini berlangsung selama tiga hari, tanggal 26-28 November 2014, setelah sebelumnya diselenggarakan rapat gelombang I di Yogyakarta pada tanggal 17-19 November 2014.

Husni meminta para operator membuka kembali catatan yang mereka miliki baik yang bersifat konvensional maupun kontemporer terkait permasalahan sistem informasi data pemilih dan sistem informasi penghitungan suara yang ditemukan selama penye-

lenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Catatan itu penting sebagai bahan diskusi dan kajian bersama untuk penyempurnaan penggunaan kedua sistem informasi tersebut ke depannya.

Sementara anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, Informasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, ada beberapa hal penting yang perlu dievaluasi dalam penggunaan Sidalih dan Situng, yaitu pelatihan, mekanisme, pelaksanaan dan output, kualitas data, aplikasi, dukungan teknis dan non-teknis dan manajemen penyelenggaraan secara keseluruhan.

KPU menyadari bahwa aplikasi yang digunakannya perlu evaluasi. Apa yang menjadi kelemahan dan kelesi-

han aplikasi itu perlu diurai, sementara KPU siapkan format yang lebih baik untuk dipakai di waktu yang akan datang.

“Pertaruhan kita bukan hanya pada kecepatan pengumpulan data-data pemilu yang dibutuhkan publik tapi yang sangat penting adalah kualitas data,” ujar Ferry.

Masalah-masalah non teknis, kata Ferry, juga tidak boleh diabaikan. Contohnya, kelayakan honor operator perlu dikaji ulang.

“Kami perlu kajian yang komprehensif. Nanti akan ada diskusi kelompok dan setelah itu setiap masalah kita bedah bersama. Saya berharap dari Bali ini lahir rekomendasi yang sangat penting untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu Indonesia ke depan,” ujar Ferry. [ald]



Peserta Rakor Sidalih dan Situng di Bali.

“Pertaruhan kita bukan hanya pada kecepatan pengumpulan data-data pemilu yang dibutuhkan publik, tapi yang sangat penting adalah kualitas data,”



Operator Situng dan Sidalih.

KPU Gelar Rapat Evaluasi Operator SITUNG dan SIDALIH Wilayah I

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat evaluasi operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih) wilayah I selama tiga hari (17-19 November 2014) di Ballroom Hotel Inna Garuda Yogyakarta.

SUARA KPU. Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dan dihadiri seluruh komisioner KPU RI serta Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim.

Rapat evaluasi diikuti 298 satuan kerja (Satker) berasal dari 16 Provinsi (Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumbar, Sumsel, Lampung, Bngkulu, Bangka Belitung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Jatim dan Bali) beserta KPU Kabupaten/kota, dengan masing-masing perwakilan dua orang tiap daerah dengan total peserta kurang lebih 487 orang.

Kepala Biro Perencanaan dan Data Informasi Lucky Firnandy dalam laporan pelaksanaan acara tersebut mengatakan, KPU mengeluarkan beberapa produk sistem informasi yang salah satunya dikenal dengan nama Sidalih

pada perjalanan tahapan pemilu, baik pemilu legislatif atau pemilu presiden/wakil presiden. Melalui aplikasi ini, tiap penduduk Indonesia dapat mengecek keberadaan mereka dalam daftar pemilih Pemilu 2014.

Begitu pula dengan Situng yang dapat menampilkan hasil pemungutan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai tingkat pusat. Dalam pelaksanaannya, kedua sistem informasi di atas pernah mendapat beberapa kendala dan penyempurnaan ke depannya perlu dilakukan evaluasi.

Dalam sambutannya, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengapresiasi keberadaan operator yang telah bekerja selama pemilu 2014 lalu. Husni berharap semangat mereka dalam bekerja tidak berhenti seiring dengan telah berakhirnya Pemilu 2014.

“Saya meminta kepada saudara-saudara semua untuk mencermati kembali data-data yang telah kita miliki kemarin untuk nantinya dapat digunakan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota nanti. Itupun apabila dilaksanakan secara langsung,” kata Husni disambut gelak tawa peserta, mengingat sampai saat ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota masih belum dibahas oleh DPR RI.

Berbicara mengenai Sistem Infomasi yang dimiliki KPU, pada pertemuan tingkat regional yang diselenggarakan di Bangkok yang dihadiri oleh salah satu Komisioner KPU, Hadar Nafiz Gumay, Sidalih telah mendapatkan apresiasi dari para peserta pertemuan meskipun saat itu belum dioperasikan.

“Ketika dioperasikan saat itu, kita mendapatkan apresiasi dari dalam maupun luar negeri,” ungkap mantan Komisioner KPU Sumatera Barat itu.

Pada hari sebelumnya, yaitu Kamis (16/10), Hadar bersama dengan dua Komisioner KPU RI lainnya, Sigit Pamungkas dan Ferry Kurnia Rizkyansyah, menerima penghargaan untuk KPU sebagai lembaga publik yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi di mata masyarakat, serta inovasi dan kebijakan yang dijalkannya sangat krusial dan strategis.

Rapat evaluasi operator Sidalih dan Situng yang dilaksanakan selama tiga hari dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas beberapa tema mulai mengenai kemampuan aplikasi yang telah ada sekarang, kegiatan pelatihan operator yang dilakukan oleh pusat, sampai dengan faktor dukungan teknis dan non teknis yang diantaranya adalah honor bagi operator itu sendiri.

Kegiatan Rapat evaluasi gelombang II rencananya akan digelar pada tanggal 28-28 November 2014, mengundang para operator Sidalih dan Situng yang ada di wilayah regional II yang mayoritas berada di wilayah Indonesia tengah dan Timur. [ald]

KPU Bahas Waktu Pemungutan Suara Pilkada Serentak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang membahas waktu penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak bagi provinsi, kabupaten dan kota yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2015 mendatang.



Rapat pembahasan kesiapan pemungutan suara pilkada serentak.

SUARA KPU. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan bahwa KPU membahas tanggal dan bulan berapa yang tepat untuk menggelar pemungutan suara pilkada 2015 secara serentak.

“Usulan yang banyak didiskusikan adalah September,” ujar Husni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).

Tetapi, kata Husni, KPU masih membahas usulan tersebut dan belum menetapkannya. Dia menuturkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sempat mengusulkan kepada KPU agar lebih dulu menetapkan tanggal pemungutan suara. Ia menyampaikan, jika sudah ditetapkan, baru peraturan terkait teknis tahapan lainnya ditetapkan.

Saat ini, KPU juga sedang membahas dan menyusun beberapa Peraturan KPU (PKPU) terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. PKPU tersebut nantinya akan dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah.

Sebelumnya, KPU dan Bawaslu menggelar rapat bersama membahas tindak lanjut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Senin (20/10).

Pertemuan itu di antaranya membahas beberapa hal baru dalam penyelenggaraan pilkada yang dalam peraturan sebelumnya belum diatur. Misalnya, penyelenggaraan pemilihan secara serentak dan pemungutan dan rekapitulasi secara elektronik

Dalam rapat itu, KPU dan Bawaslu telah memiliki kesepahaman dalam melaksanakan amanat Perppu 1/2014 dan masing-masing penyelenggara akan menyusun peraturan sesuai dengan kewenangannya. [ald]

KPU Targetkan Laporan Evaluasi Pemilu Terkumpul Desember

Evaluasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang harus dilakukan agar kelemahan atau kekurangan bisa diperbaiki di kesempatan Pemilihan Umum berikutnya. Tetapi, evaluasi tidak boleh terlalu lama.

SUARA KPU. KPU Pusat meminta jajaran KPU Provinsi dan kabupaten/kota segera menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2014. KPU menargetkan, laporan dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota diterima KPU pertengahan Desember 2014 mendatang.

“Disusun laporan secara detail dan menyeluruh. Kami menargetkan, pertengahan Desember semua laporan dari KPU provinsi dan kabupaten/kota yang sudah terperinci sudah harus terkumpul,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 KPU dengan KPU Provinsi Seluruh

Indonesia, di Batam, Rabu (22/10).

Ia mengatakan, semua laporan itu akan disusun dalam satu laporan. Evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2014 akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemilu mendatang.

KPU menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2014, selama tiga hari, 22 hingga 24 November 2014. Evaluasi penyelenggaraan pemilu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Tujuan pelaksanaan evaluasi ini adalah memetakan permasalahan dan

menarik pelajaran dari hasil, manfaat, dan dampak atas semua kegiatan pemilu. Evaluasi tersebut, kata Husni, akan menjadi koreksi, tindak lanjut dan rekomendasi bagi pimpinan KPU dalam penyusunan regulasi, perencanaan implementasi dan penganggaran pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

KPU melibatkan semua pemangku kepentingan pemilu dalam pelaksanaan evaluasi Pemilu 2014 ini. Evaluasi tersebut mencakup keluaran (outputs), hasil (results), manfaat (benefits), dan dampak (impacts).

[ald]



Kegiatan Orientasi Tugas Penyelenggaraan Pemilu Gelombang IV diikuti ratusan peserta.

Sepuluh KPU Provinsi Ikuti Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pelaksanaan Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Gelombang IV tahun 2014, di Hotel Harris, Jl Engku Putri, Batam Center, Kepulauan Riau. Kegiatan orientasi ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari dari tanggal 27 s.d 31 November 2014 dan diikuti 60 peserta dari 10 KPU Provinsi, masing-masing lima komisioner dan satu sekretaris per provinsi, yang sudah dilantik namun belum mengikuti orientasi.

SUARA KPU. Kesepuluh KPU Provinsi tersebut antara lain, KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Lampung, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi NTB, KPU Provinsi NTT, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Provinsi Maluku, KPU Provinsi Maluku Utara, dan KPU Provinsi Papua.

“Pelaksanaan orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu,” ujar Wakil Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU Ismanto Eko Ariyanto, dalam laporan pembukaan pelaksanaan orientasi ini.

Usai upacara pembukaan dan pen-

arahan dari Ketua KPU Husni Kamil Manik yang didampingi Komisioner KPU Sigit Pamungkas, para peserta mengikuti pembahasan materi dengan tema “Fasilitasi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemilu” yang dimoderatori oleh Ismanto Eko Ariyanto.

Hadir sebagai pembicara pada materi tersebut, Kasubbid Penyerasian Kebijakan dengan Lembaga Pemerintah Ditjend Dukungil Kementerian dalam Negeri, Rara Yusnani Hendriana.

Dalam pemaparannya, Rara membicarakan banyak seputar kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian

data kependudukan secara nasional, seperti database kependudukan, penertiban NIK, dokumen kependudukan hingga pemanfaatannya untuk pemilu. [ald]

“Pelaksanaan orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu,”

Calon Pegawai Negeri Sipil KPU Jalani Tes Kemampuan Dasar

Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar ujian Tes Kemampuan dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2014, Sabtu (18/10).

SUARA KPU. Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar ujian Tes Kemampuan dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2014, Sabtu (18/10).

Dari 163 peserta, yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti TKD, 24 dinyatakan gugur lebih dulu karena tidak mengambil nomor dan tidak hadir pada saat ujian TKD digelar.

Ujian TKD ini berlangsung serentak di dua tempat, yaitu SMA Negeri 68 Jakarta dan SMK Negeri 1 Budi Utomo Jakarta. Pelaksanaan ujian dibagi dalam dua gelombang. Peserta gelombang pertama mengikuti ujian atau tes TKD pada pukul 08.00-09.30 WIB dan gelombang kedua pada pukul 11.00-12.30 WIB.

Dalam pengarahan yang dibacakan oleh Wakil Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU RI, Ismanto Eko Ariyanto, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim, mengatakan bahwa sistem pengadaan seleksi CPNS tahun 2014 berbeda

dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, seluruh instansi pemerintah wajib menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* dalam melaksanakan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pendaftarannya harus menggunakan aplikasi pendaftaran CPNS secara online yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni sscn.bkn.go.id,” ujar Arif, sebagaimana dibacakan Eko Ariyanto.

Penggunaan sistem tersebut dimaksudkan untuk menjaga proses pendaftaran CPNS yang terintegrasi, sehingga lebih transparan, akuntabel dan objektif. Selain itu, pemanfaatan sistem ini juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses perekrutan PNS serta peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Seleksi melalui sistem CAT ini juga diharapkan mampu memberi kemudahan bagi peserta tes untuk melakukan pendaftaran dan kemudahan bagi instansi dalam melaksanakan proses pendaftaran CPNS, seleksi administrasi,

dan pemberian nomor tes.

Selanjutnya, pemakaian sistem CAT dilakukan dalam rangka menerapkan standarisasi proses pendaftaran dan database peserta tes yang sesuai dengan kebutuhan BKN dalam proses penetapan NIP.

Karena itu ia mengimbau agar seluruh peserta jangan mudah percaya kepada oknum-oknum yang menjanjikan para peserta tes dapat diterima menjadi CPNS Setjen KPU dan Sekretariat KPU Provinsi dengan imbalan tertentu.

Ia menekankan kepada para peserta ujian untuk percaya terhadap kemampuan diri sendiri, berkompetisi secara sehat, dengan terus membekali kemampuan diri.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang akan diterima menjadi PNS di Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi formasi 2014, benar-benar peserta terbaik dari hasil seleksi administrasi, Tes Kompetensi Dasar, dan Tes Kompetensi Bidang,” tegas Arif. [ald]



Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) peserta tes kemampuan dasar.



Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Walikota Bandar Lampung Herman, menandatangani prasasti peresmian gedung.

Gedung KPU Kota Bandar Lampung dan Pringsewu Diresmikan

Selasa (18/11), boleh jadi hari yang membahagiakan buat anggota dan karyawan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu, Lampung. Hari itu, gedung KPU Kota Bandar Lampung dan gedung KPU Kabupaten Pringsewu diresmikan setelah menjalani proses pembangunan satu tahun lamanya.

SUARA KPU. Tak tanggung-tanggung, peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik; Walikota Bandar Lampung, Herman HN; Ketua beserta Anggota KPU Provinsi Lampung dan 14 Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Upacara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua KPU dan Walikota Bandar Lampung, serta penandatanganan prasasti KPU-kabupaten Pringsewu oleh Ketua KPU, dilanjutkan dengan penguntingan-pita oleh Walikota Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Husni mengatakan, kantor merupakan sesuatu yang mahal bagi KPU. Sebelum gedung ini dibangun, KPU Provinsi Lampung mengalami masalah

dengan keadaan kantor yang masih berpindah-pindah.

"Hingga kini, KPU baru memiliki gedung definitif, termasuk aset yang dikelola oleh KPU, 25 persen dari 531 satuan kerja yang KPU kelola dan ini akan bertambah 18 unit satuan kerja seiring bertambahnya daerah otonomi baru satu provinsi, yakni Kalimantan Utara dan 17 kabupaten daerah otonomi baru," katanya.

KPU menargetkan dalam lima tahun ke depan, sebelum pemilu nasional tahun 2019 yang pemilu legislatif dan pemilu presiden-nya digelar serentak, seluruh pembangunan kantor KPU di daerah telah rampung, termasuk Kantor KPU Pusat. Pembangunan tersebut, menurut Husni, membutuhkan prioritas-prioritas. Ia ber-

harap, keberadaan kantor yang telah definitif ini memperkuat kemandirian KPU dari intervensi pihak manapun, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah. Gedung KPU Kota Bandar Lampung yang baru diresmikan itu memiliki luas bangunan 597 meter persegi dan luas tanah 2000 meter persegi. Sedangkan gedung KPU Kabupaten Pringsewu dengan luas bangunan 972 meter persegi dan luas tanah 2000 meter persegi.

Dengan telah selesainya pembangunan gedung KPU Kota Bandar Lampung dan KPU Kabupaten Pringsewu, maka akan sangat membantu tugas-tugas KPU di masa mendatang. Terlebih lagi dengan adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak, maka tugas dan fungsi KPU akan dapat semakin optimal. [ald]

Pelantikan PAW Komisioner KPU Deli Serdang

Tiga Komisioner Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang provinsi Sumatera Utara (Sumut) pengganti antar waktu (PAW), resmi dilantik KPU Sumut pada Kamis (6/11), di Aula Sekretariat KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Mereka adalah Bobby Indra Prayoga, Rajuddin Batubara dan Lisbon Situmorang.

SUARA KPU. Ketiganya dilantik menggantikan tiga anggota sebelumnya yang diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam pelantikan itu, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, menegaskan kepada anggota KPU PAW untuk bekerja keras mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara, khususnya di Deli Serdang.

Harus diakui, penyelenggaraan Pemilu di kabupaten Deli Serdang itu kerap bermasalah hingga berujung pada pemecatan. Dalam dua periode belakangan, sudah terjadi dua pemecatan. Total lima orang anggota KPU Deli Serdang diberhentikan oleh DKPP di masa kepemimpinan Mulia Banurea menjabat Ketua KPU Sumut. Ya, penyelenggaraan Pemilu di Deli Serdang mendapat rapor merah.

"Saya berharap para komisioner

bekerja secara baik. Memahami setiap aturan, agar ke depan tidak ada lagi pemberhentian oleh DKPP," kata Mulia yang memimpin langsung prosesi pelantikan.

Setelah pelantikan, Mulia Banurea juga berpesan agar komisioner yang baru dilantik tetap menjaga nama baik lembaga dan nama baik diri sendiri sebagai penyelenggara.

Oktober lalu, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada empat penyelenggara Pemilu. Mereka divonis terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan (Jumat, 17/10), di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Sidang ini juga disiarkan melalui video conference dengan Bawaslu terkait, Bawaslu Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Ketua Majelis-nya adalah Jimly

Asshiddiqie, sedangkan anggota majelis Nelson Simanjuntak, Anna Erliyana dan Valina Singka Subekti.

Para penyelenggara Pemilu yang diberhentikan adalah Ketua Panwaslu Konawe Utara Marwan Khalid, Ketua dan anggota KPU Deli Serdang masing-masing Erwin Lubis, Rahmad dan Abror M Daud Faza.

Sedangkan untuk anggota Panwaslu Konawe Utara atas nama Naima, dan dua anggota KPU Deli Serdang atas nama Timo Dahlia Daulay dan Arifin Sihombing, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras. Sedangkan kepada Ketua Panwaslu Kotawaringin Timur, Eka Sazli, DKPP memberikan peringatan.

Tidak semua Teradu diberikan peringatan. Dari jumlah total sebanyak 17 Teradu, DKPP merehabilitasi sembilan penyelenggara Pemilu. [ald]



Komisioner KPU Deli Serdang menjalani sumpah jabatan.

KPU Sumsel Menunggu Arahan Pusat Sebelum Bergerak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) baru akan bergerak secara aktif melakukan persiapan tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di tujuh kabupaten di Sumsel pada awal tahun 2015 mendatang.



Gedung KPU Sumsel.

SUARA KPU. Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), Aspahani.

Hal tersebut, jelas dia, disebabkan KPU RI yang masih menunggu pembaha-

san Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

"Kejelasan ini kemungkinan baru didapat Januari 2015. Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan Februari baru kami bisa melaksanakan tugas secara maksimal," ungkap Aspahani, dikutip dari media online, Jumat (14/11).

Kendati waktu persiapan cukup banyak terbuang, KPU Sumsel tetap tak khawatir akan kewalahan melakukan tahapan. Bagi Aspahani, pihaknya cukup mendapat waktu karena rencana awal Pilkada digelar serentak pada Juni kemungkinan diundur hingga September 2015.

Hal ini berkaitan dengan dengan wacana yang muncul pada rapat evaluasi penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Batam, Kepulauan Riau, 22-24 Oktober lalu, yang mana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota digelar serentak se-Indonesia pada 2015.

"Kalau memang tidak ada lagi perubahan, waktu yang ada relatif masih panjang. Kemungkinan pemilihan bakal dilaksanakan serentak se-Indonesia September 2015. Dan rentang waktu yang kami miliki sangat cukup," jelasnya. [ald]

KPU Babel Gelar FGD dengan KPU Kabupaten/Kota

Pileg dan Pilpres yang telah usai menyisakan beragam masalah di tiap tingkatan daerah dengan karakteristik permasalahan yang berbeda-beda. Mengakomodir permasalahan yang ada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Belitung menggelar *Focus Group Discussion (FGD)* evaluasi terkait masalah hukum tahapan pemilu.

SUARA KPU. Kegiatan digelar bersama KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan FGD dilaksanakan pada hari Kamis (13/11) bertempat di Ruang rapat KPU Babel. Narasumbernya adalah Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansah.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi didampingi oleh Anggota KPU Provinsi. Dalam sambutannya Ketua KPU Babel, Fahrurrozi, mengharapkan FGD yang dilaksanakan dapat memudahkan KPU Kabupaten/Kota dalam memetakan permasalahan Pemilu sesuai dengan tingkatan dan solusinya sehingga penyelesaian yang dilakukan akan tepat sasaran dan tidak menyisakan permasalahan lanjutan.

han lanjutan.

Setelah dibuka oleh Ketua KPU Babel, Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansah, langsung memaparkan tindakan yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi masalah hukum tahapan pemilu dengan menginventarisir masalah hukum yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap tahapan Pemilu yang sudah berlangsung.

Lebih lanjut Ferry menambahkan, agar KPU daerah segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang ditemukan, sehingga tidak menjadi permasalahan baru. FGD juga membahas kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tahapan

pemilu yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menjadi catatan bagi penyelenggaraan Pemilu mendatang, terutama KPU Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada secara serentak pada September 2015.

Kegiatan FGD berlangsung dengan suasana kekeluargaan, sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi KPU RI, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota usai pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Sebelum pelaksanaan FGD, Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansah, berkeliling kantor KPU Provinsi Babel dan melihat keadaan kantor dan kegiatan perkantoran yang berlangsung di KPU Babel. [ald]

KPU Banten Beri Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu yang Berprestasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten telah membentuk Tim Penilai bagi KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan kategori yang diunggulkan (*best practice*).

SUARA KPU. Hal itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta berdasarkan Surat Edaran Nomor 1661/KPU/X2014 tanggal 24 Oktober 2014 Perihal Pemberian Penghargaan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi, maka . Kategori unggulan dalam hal ini terbagi dalam enam segmen unggulan.

Yakni, Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu, Daftar Pemilih Berkualitas, Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas, Transparansi Informasi Pemilu, Iklan Layanan Masyarakat Kreatif, dan Pemilu Akses. Penilaian dan pemberian penghargaan tersebut diberikan kepada penyelenggara

ra pemilu (KPU Kabupaten/Kota) serta partisipasi masyarakat perseorangan.

Anggota KPU Banten, Dra. Hj. Enan Nadia, menyampaikan bahwa delapan KPU Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten mengajukan kategori yang diunggulkan, dan tidak semua KPU Kabupaten/Kota mengajukan seluruh kategori yang ditetapkan.

Sampai dengan saat ini, tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai KPU Provinsi Banten adalah pengumpulan bahan penilaian sampai dengan tanggal 21 November 2014, dan proses penilaian mulai tanggal 22-25 November 2014.

Adapun penetapan pemenang penghargaan akan dilaksanakan pada

tanggal 26 November 2014, serta penyampaian hasil pemenang akan dilaksanakan antara tanggal 27-30 November 2014.

Tim Penilai Tingkat KPU Provinsi Banten sebanyak 7 (tujuh) orang, dimana 4 (empat) orang dari internal KPU Provinsi dan 3 (tiga) orang dari eksternal, diantaranya adalah Ketua H. Abdul Malik, M.Si (UNSER), Sekretaris Ahmad Lutfi, S.Ag. (Radar Banten), dan Anggota terdiri dari Dr.H. Suadi Sa'ad, M.Ag. (IAIN SMHB), Dra. Hj. Enan Nadia (Anggota KPU Provinsi Banten), Ir. H. Didih M. Sudi, M.Si (Anggota KPU Provinsi Banten), Syaefu Ahri, MM (Anggota KPU Provinsi Banten), dan Lia Rista Dewi, SH., MH (UNTIRTA). [ald]

Tim Penilai Tingkat KPU Provinsi Banten sebanyak 7 (tujuh) orang, dimana 4 (empat) orang dari internal KPU Provinsi dan 3 (tiga) orang dari eksternal,



NANA SHOBARNA, ANGGOTA KPU KOTA DEPOK

Kenalkan Pemilu Sejak Dini



Setiap daerah punya tantangan masing-masing, yang unik dan mengesankan, bagi pribadi lepas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu pula wilayah Depok, Jawa Barat, yang juga dikenal sebagai kota penyangga ibukota negara, Jakarta.

termasuk anak-anak pelajar.

Belum lama ini, tepatnya tanggal 13 November 2014, KPU Kota Depok bekerja sama dengan Sekolah Dasar Islam Fitrah (SDIF) Al-Fikri Sukmajaya-Depok, mengadakan kegiatan pendidikan politik yang unik dan menyenangkan. Yaitu, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014".

Kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden SDIF Al-Fikri berlangsung selama dua bulan dan diikuti siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD.

"Siswa dibimbing dan diajarkan melaksanakan tahapan pemilu persis seperti pemilu presiden sungguhan. Diantara tahapan yang dilakukan para siswa yaitu mulai dari pembentukan partai, pencalonan, kampanye, debat kandidat sampai dengan pencoblosan," ungkap Nana beberapa waktu lalu.

Menurut Nana, kegiatan ini adalah bagian dari strategi KPU Kota Depok untuk memperkenalkan dan mensimulasikan sejak dini pengetahuan kepemiluan kepada peserta didik di sekolah.

Nana mengakui, Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga ibu kota, dengan pemilih lebih dari 1,2 juta pemilih dan dengan segala kemandirian serta kompleksitas permas-

alahannya, membuat KPU Kota Depok harus memikirkan secara ekstra cara-cara yang elegan dalam sosialisasi pemilu.

"Hal ini dimaksudkan agar pemilih yang ada di Kota Depok tidak apatis terhadap pemilu," ucap Nana, yang mengaku selalu menganggap tugas pendidikan politik sebagai tugas yang menggembirakan.

Dia mengungkapkan juga bahwa keberhasilan sosialisasi pemilu di Kota Depok terbukti dengan meningkatnya tingkat partisipasi pemilih 11 persen pada pemilu legislatif dan pemilu presiden yang lalu.

Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ini mengatakan, telah banyak hal yang dilakukan oleh KPU Kota Depok dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilu. Salah satu upaya yang unik dilakukan adalah dengan mengadakan "mobil war-war".

"Cara konvensional ini dilakukan dengan cara mengingatkan kepada warga dengan menggunakan mobil dan pengeras suara yang berkeliling keseluruh pelosok Kota Depok," jelasnya.

Nana berharap, cara-cara sosialisasi yang maksimal akan menghasilkan kualitas pemilu yang maksimal pula. **[ald]**

SUARA KPU. Selaku Anggota KPU Kota Depok, Jawa Barat, Nana Shobarna, begitu dengan masyarakatnya. Sesuai bidang tugas dan "spesialisasinya", beliau yang paling intensif melakukan sosialisasi mengenai segala hal terkait pemilihan umum ketika seluruh rakyat Depok yang sudah punya hak memilih begitu antusias menyambut Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2014.

Nana selalu mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak suara. Baginya, sosialisasi merupakan bagian atau tahapan yang paling penting dilakukan oleh pihak penyelenggara.

Bahkan di luar masa-masa pemilu, pendidikan politik wajib terus diteruskan kepada masyarakat luas,

"Siswa dibimbing dan diajarkan melaksanakan tahapan pemilu persis seperti pemilu presiden sungguhan. Diantara tahapan yang dilakukan para siswa yaitu mulai dari pembentukan partai, pencalonan, kampanye, debat kandidat sampai dengan pencoblosan,"

AGUS SISWOYO – ANGGOTA KPPS JOMBANG

Tetap Semangat Meski Puasa

SUARA KPU. Hajatan pesta demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 9 Juli 2014 memang sudah lewat. Namun baru sekarang, saya sempat menuliskan pengalaman menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Dusun Guwo Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. *Never too late to start sharing what we had done.*

Coblosan dimulai pada pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Animo masyarakat di TPS 03 kelihatan sekali mengalami penurunan dibanding Pileg bulan April 2014 lalu. Dari 394 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercantum, warga yang menggunakan hak pilih hanya 285 orang. Itu pun masih ada satu suara yang tidak sah.

Berkurangnya minat masyarakat untuk mencoblos ini boleh jadi disebabkan oleh berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon-calon yang ada. Atau bisa juga karena pilpres kali ini berlangsung di bulan puasa sehingga masyarakat ogah-ogahan keluar rumah di cuaca panas.

Bagi saya, sebagai anggota KPPS, menggelar Pilpres di TPS 03 dalam situasi bulan puasa menjadi tantangan tersendiri. Kondisi siang hari yang panasnya menyengat adalah tantangan bagi KPPS untuk tetap aktif bekerja dengan energi yang terus menurun.

Untungnya, di sekitar lokasi TPS 03 ditumbuhi pohon mangga yang daunnya rimbun sehingga efek panas matahari bisa sedikit dikurangi. Lain halnya dengan TPS 01 yang berada di tengah lapangan sepakbola. Wedew bukan main panasnya! Untungnya jam 15.00 semua aktifitas di TPS 03 sudah selesai dan tenda coblosan

sudah dibongkar pula.

Hal lain yang menarik dari Pilpres 2014 adalah hasil hitung cepat (quick count) sejumlah media menunjukkan hasil yang berbeda-beda. TV satu menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 sebagai pemenang. TV yang lain malah sebaliknya. Begitu juga dengan pemberitaan media cetak yang saling mengklaim sebagai yang paling benar.

Masyarakat dibuat bingung dengan hasil penghitungan cepat yang simpang-siur ini. Dari sekian banyak media yang memberitakan hasil pilpres, hanya ada satu atau dua media saja yang bisa netral. Pengumuman resmi hasil pilpres dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli 2014.

Over all, masyarakat sepertinya tidak mau ambil pusing dengan hasil hitung cepat Pilpres 2014. Siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih seolah tidak akan berpengaruh bagi mereka. Masyarakat lebih menunggu pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) dari pada ingin tahu siapa presiden mereka untuk kurun waktu lima tahun mendatang.

Ya, acuh tak acuh adalah pilihan setiap orang. Tapi mengabaikan masa depan dengan berpasrah pada keadaan bukanlah pilihan bijak. Semoga tulisan ini bisa memberi inspirasi bagi Anda! **[Mit]**



Proses Pemilu 2014 di Meksiko, Menghidupkan Ciri Khas Gotong Royong



Oleh: **Octa Kusuma Nugraha,**
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Mexico City Manuel Dublan 54, Casa #1.
Colonia Tacubaya, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal

MEKSIKO masuk ke dalam 20 besar negara yang memiliki daratan terluas di dunia dengan luas mencapai 1,9 juta km². Total area ini sedikit lebih kecil dibanding Indonesia yang memiliki luas daratan 1,99 juta km².

SUARA KPU. Luasnya wilayah Meksiko ini sekilas mencerminkan kendala yang dihadapi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri Mexico City dalam melakukan seluruh tugas pokok dan fungsi seperti pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi pemilihan umum. Ditambah lagi, wilayah kerja PPLN Mexico City tidak hanya sebatas Meksiko, tetapi juga mencakup negara Guatemala, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, dan El Salvador.

Memang betul, Daftar Pemilih Tetap PPLN Mexico City dalam Pemilu Legislatif 'hanya' mencapai 350 pemilih. Jumlah pemilih ini mungkin tidak besar. Namun slogan KPU "Satu Suara sangat Penting untuk Menentukan Nasib Bangsa" seolah mencerminkan pentingnya hak suara tiap individu.

Untuk menanggulangi hal ini, maka satu ketua dan empat anggota PPLN Mexico City, masing-masing kebagian tugas untuk menghubungi sekitar 53 pemilih untuk mendapatkan data terkini terkait informasi apakah WNI tersebut masih berada di wilayah kerja PPLN Mexico City dan alamat lengkap tempat tinggalnya.

Proses yang dilakukan melalui kontak telepon dan surat elektronik ini tidak berjalan mulus. Beberapa WNI tidak dapat dihubungi, dikarenakan pindah tempat tinggal atau berganti nomor telepon. Tidak kehilangan akal, PPLN mencoba bertanya kepada sang pemilik rumah baru terkait informasi kemana pindahannya WNI tersebut atau mencoba menghubungi sanak famili lainnya. Maklum, slogan "Satu Suara sangat

Meski demikian, proses demokrasi ini tidak sampai menciptakan kubu-kubu yang saling berseberangan. Salah satu pertanyaan yang kerap dilontarkan para pemilih adalah mengapa proses pemilihan umum di luar negeri diselenggarakan lebih cepat dibanding di dalam negeri.

Hal ini menjadi tanda tanya karena diduga dapat menimbulkan kecurangan, terutama terkait tenggang waktu antara pencoblosan dan perhitungan kertas suara dengan jeda yang cukup lama.

Demi menyanggah timbulnya kecurangan, PPLN Mexico City memberikan jaminan bahwa tidak akan ada kecurangan mengingat se usai proses pencoblosan, kotak suara akan diberi label dan digembok dengan tiga kunci yang dipegang oleh Ketua PPLN, KPPSLN, dan saksi. Hal serupa pun berlaku untuk surat suara yang diterima melalui pos.

Selain itu, alasan dipercepatnya waktu pencoblosan di luar negeri adalah mengingat, baik 9 Juli dan 9 April 2014 jatuh pada hari Rabu. Maklum, sebagian besar WNI pada hari tersebut melakukan aktivitas bekerja. Berbeda dengan di dalam negeri, yang melakoni libur nasional.

Partisipasi WNI tidak hanya terlihat dalam proses pencoblosan. Beberapa hari menjelang Hari-H, seluruh anggota PPLN dan KPPSLN turut dibantu oleh beberapa WNI guna memperindah tampilan TPSLN yang berada di area KBRI Mexico City agar terlihat lebih 'Indonesia'. Aktivitas saling membantu ini seolah mengingatkan kembali akan ciri khas gotong-royong yang merupakan salah satu identitas budaya Indonesia, kami seolah-olah merasa seperti berada di dalam negeri, tanpa ada batas pemisahan jarak dan waktu.

Pemilu 2014 adalah pesta demokrasi bagi seluruh WNI. Semoga pesta ini menjadi ajang pendewasaan diri, dewasa untuk memilih, dewasa untuk menang, juga dewasa untuk kalah, bukan malah terpecah belah. [mel]



Pemutakhiran Data

Demi mendapatkan data pemilih yang *reliable*, PPLN Mexico City melakukan koordinasi dengan KBRI Mexico City terkait Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah kerja PPLN Mexico City. Dari hasil data kerjasama tersebut, timbul permasalahan baru. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif yang mencapai 350 pemilih, hanya 81 pemilih yang akan melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Mexico City. Alias, 269 pemilih lainnya akan melakukan pemilihan melalui pos.

Penting untuk Menentukan Nasib Bangsa" terus terpatri di dada.

Sosialisasi

Usai proses pemutakhiran data, terbit lembaran baru: sosialisasi. Meski tinggal di luar negeri, namun hiruk-pikuk pemilihan umum 2014 kali ini, harus diakui menimbulkan gelombang antusiasme yang sangat besar dikalangan WNI. Lebarnya pintu arus informasi dari dalam negeri seolah membantu PPLN dalam hal sosialisasi pemilu, baik terkait partai-partai peserta pemilu maupun pasangan calon presiden.



Dilma Rousseff Terpilih Lagi Jadi Presiden Brazil

"Sistem e-voting ini telah diterima secara luas karena sangat mempercepat proses penghitungan suara."

SUARA KPU. Brazil menggelar pemilihan umum (pemilu) pada 6 Oktober lalu. Negeri samba itu menggelar pemilu serentak baik pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres) hingga pemilihan gubernur (Pilgub). Presiden Dilma Rousseff bertarung melawan penantang politisi Partai Demokrasi Aecio Neves, dan juga Marina Silva, mantan Menteri Lingkungan Hidup Brazil.

Sekitar 142,8 juta warga Brazil memberikan suara mereka untuk memilih seorang presiden, 27 gubernur, 513

anggota Kongres dan 1.069 anggota parlemen regional serta Senat. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, lebih dari 400 ribu personil keamanan, termasuk 30.000 tentara, dikerahkan untuk berjaga-jaga.

Sebagai negara terbesar kelima di dunia, kemajuan teknologi Brazil sudah bisa digunakan untuk menjalankan transaksi elektronik voting (e-voting). Pemungutan suara elektronik pertama kali diperkenalkan ke Brazil pada tahun 1996, dengan tes percobaan pertama dilakukan di neg-

ara bagian Santa Catarina. Kemudian, mesin voting ini baru dipergunakan menyeluruh pada Pemilu tahun 2000.

Sistem e-voting ini telah diterima secara luas karena sangat mempercepat proses penghitungan suara. Dalam pemilu Brazil tahun 1989, menghabiskan waktu sembilan hari untuk melakukan penghitungan suara. Pasca diterapkannya sistem e-voting, yaitu dalam Pemilu tahun 2002 hanya dibutuhkan kurang dari 12 jam. Semakin canggih teknologi yang digunakan, dalam Pemilu 2014 kemarin hasil Pemilu sudah dapat

diketahui pukul 17.00 waktu setempat pada hari yang sama di hari Pemilu berlangsung.

Brazil juga meminjamkan mesin voting untuk negara-negara lain. Di antaranya adalah pada pemilihan umum Uruguay dan Ekuador.

Kembali ke soal Pemilu, dalam pemilihan presiden tak satupun kandidat yang memiliki suara mayoritas. Dua capres teratas adalah Dilma dan Neves. Dengan demikian, pilpres putaran kedua terpaksa digelar, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober.

Seperti halnya di Indonesia, persaingan antara kedua kubu sangat ketat. Saat berkampanye, masing-masing kandidat saling lempar isu masa lalu. Dilma menyerang saingannya dengan iklan kampanye yang meminta rakyat Brazil mengingat "hantu masa lalu" ketika partai yang mengusung Neves memerintah dengan membuat rakyat terperosok ke jurang kemiskinan, pengangguran marak, dan hiper inflasi.

Sementara Partai Buruh yang mengusung Dilma berkomitmen untuk mencabut jutaan orang keluar dari

kemiskinan dan menjadi masyarakat kelas menengah dan menurunkan pengangguran tertinggi dalam sejarah. Membalas sindiran Dilma, Neves juga meminta rakyat Brazil untuk melihat "monster masa lalu" yang menyebabkan resesi ekonomi, inflasi di atas 6,5 persen, tuduhan bahwa Partai Buruh terlibat dalam korupsi perusahaan minyak negara, Petrobras.

Hingga akhirnya Pilpres putaran kedua digelar pada 26 Oktober, yang akhirnya dimenangkan kembali oleh Dilma. Ia berhasil meraih suara sebesar 51,45 persen, beda tipis dengan Neves yang mendapat suara sebanyak 48,55 persen. Selisih suara kedua kandidat berkisar 2 juta orang pemilih. Dengan demikian, ini adalah kali kedua masa jabatan Dilma sebagai Presiden Brazil.

Dalam pidato kemenangannya di Brazil, Dilma mengatakan, ia berharap dapat menjadi presiden yang lebih baik di masa jabatannya yang kedua dan mengatakan bahwa dia bertekad untuk melakukan reformasi dan perubahan sesuai dengan tuntutan warga Brazil. Namun, pasar Brasil merosot tajam setelah kelompok sayap kiri memenangi pemilihan ulang dengan

perolehan angka ketat, meskipun Presiden Dilma Rousseff telah berjanji untuk menyatukan bangsa dan meningkatkan ekonomi yang selama ini statis. Ada dugaan, hal ini terjadi karena sosok Neves lebih disukai dalam dunia bisnis.

Harga saham sempat sedikit naik tetapi ditutup turun 2,77 persen, sedangkan harga Real turun 2,58 persen menjadi 2,52 Real per dolar AS yang merupakan posisi terendah sejak 2005. Saham perusahaan minyak raksasa milik Brazil, Petrobras, tercatat turun 12,33 persen. Terkait dengan hal tersebut, Presiden perempuan ini berusaha untuk meminimalisir gejolak pasar dalam wawancara pertamanya pasca pemilu.

"Pasar jatuh di AS, pasar jatuh di Eropa. Seluruh dunia memang sedang menghadapi banyak kesulitan. Memang benar bahwa pasar Brasil lebih turun. Namun saya tidak akan menjabarkan langkah-langkah untuk mengatasi situasi itu di sini, masalah-masalah besar itu akan dibahas dengan semua sektor. Mari berharap agar pasar kembali tenang dan hal itu akan terjadi," ujar Dilma. [yan]



FAKTA BRAZIL

Ada beberapa negara yang berbatasan dengan Brazil. Negara-negara tersebut adalah Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, serta seluruh negara di Amerika Selatan kecuali Ekuador dan Chili. Di sebelah timur, Brazil berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di bagian utara Brasil terdapat Hutan Amazon dan semakin terbuka ke arah selatan dengan bukit-bukit dan gunung kecil.

Daerah selatan merupakan pusat populasi dan agrikultur Brasil. Iklim Brasil adalah tropis karena terletak di khatulistiwa dengan sedikit variasi. Di selatan, iklimnya lebih sedang, namun kadang mengalami salju. Curah hujan sangat tinggi di daerah Amazon sedangkan daerah yang lebih kering bisa ditemukan di daerah timur laut. Kota-kota penting di Brasil antara lain Brasilia, São Paulo dan Rio de Janeiro.



Perdana Menteri Victor Ponta dan Walikota Sibiu Klaus Iohannis.

Pilpres Panaskan Tensi Politik di Rumania

Pemilihan presiden (Pilpres) Rumania yang digelar pada 2 November lalu sempat memicu ketegangan. Dari 14 kandidat yang bersaing memperebutkan kursi orang nomor satu di Rumania, hanya ada dua kandidat yang memiliki suara mayoritas.

SUARA KPU. Sisanya, hanya mendapat suara tak lebih dari 6 persen saja sehingga pemerintah terpaksa gelar putaran kedua pada 16 November. Dua kandidat yang memiliki suara mayoritas adalah Perdana Menteri Victor Ponta dan seorang Walikota Sibiu, Klaus Iohannis.

Dalam visi dan misinya, Ponta mengatakan jika menang ia akan menciptakan stabilitas dan berusaha mengakhiri perselisihan sengit antara perdana menteri dan presiden. Sementara Iohannis mengatakan bahwa ia akan menjamin sebuah sistem hukum dan penegakan hukum yang independen.

Selain masalah hukum, hal lain yang menjadi janji Iohannis adalah mengatasi korupsi di mana Rumania yang menjadi salah satu negara Uni Eropa

yang paling korup.

Dari hasil perolehan suara, Ponta mendapatkan suara tertinggi sebesar 41,5 persen disusul Iohannis, yang mendapatkan 32,1 persen suara. Namun para pendukung Iohannis tak terima dengan hasil tersebut. Hal ini karena perbedaan suara di dalam dan luar negeri.

Di Rumania, Perdana Menteri Victor Ponta meraih 40 persen suara, sementara saingannya Klaus Iohannis hanya meraih 30 persen suara. Namun dalam Pemilu yang digelar di luar negeri hasilnya justru terbalik, Iohannis memenangkan 46 persen suara, sementara Ponta memiliki 18 persen suara. Hal ini disebabkan karena karena terbatasnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di negara-negara termasuk Prancis, Jer-

man dan Inggris. Akibatnya, banyak orang yang tidak sempat memilih karena disebabkan oleh antrean yang panjang.

Perbedaan hasil suara ini juga kemudian memicu aksi protes di mana sekitar 10 ribu orang dari kota-kota seperti di Timisoara, Bucharest, Oradea, dan Constanra (Sabtu, 8/11). Mereka melakukan aksi protes menuduh pemerintah membatasi pemilih yang tinggal di luar negeri menyerukan Ponta untuk mengundurkan diri. Ponta dituduh sengaja mengadakan pemilihan umum yang tidak adil. Ini juga membuat Menteri Luar Negeri Rumania, Titus Corlatean, mengundurkan diri.

Akhirnya, tibalah hari yang dinantikan rakyat Rumania. Lebih dari 18 juta orang dari 21,5 juta penduduk

Rumania tercatat telah diperbolehkan menggunakan hak suaranya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rumania mengatakan 21.400 TPS telah didirikan di seluruh wilayah.

Pemilihan presiden putaran kedua pada 16 November digelar yang membawa pemimpin Partai Nasional Liberal, Iohannis, memenangkan Pemilihan Presiden Rumania 2014. Ia merupakan orang pertama dari etnis minoritas yang menjadi presiden. Iohannis memenangkan pemilihan presiden dengan unggul 10 poin dari pesaing utamanya, Perdana Menteri Victor Ponta. Iohannis mendapat 54,7 persen suara mengalahkan 45,3 persen milik Ponta.

Hasil tersebut sangat mencengangkan mengingat pada putaran pertama dua pekan lalu Ponta memimpin perolehan suara. Meski harus menerima kekalahan tragis, Ponta mengatakan, menerima sepenuhnya hasil Pilpres ini. Ia mengaku telah menelpon Iohannis untuk memberikan selamat.

Walau sudah menerima kekalahan, Ponta menyatakan tidak akan mundur dari jabatan PM. Ia akan tetap menduduki kursi tersebut hingga Pemilihan Umum (Pemilu) parlemen yang akan diselenggarakan pada 2016.

"Saya tidak punya alasan untuk mengundurkan diri," kata Ponta (Senin, 16/11).

Keputusan Ponta tersebut ternyata membuat tensi politik di Rumania memanas. Ribuan warga di negara yang terletak di Eropa Timur itu kembali turun ke jalan dan menuntut Ponta mengundurkan diri.

Mereka sudah enggan dipimpin Ponta karena tata kelola negaranya terus memburuk beberapa tahun belakangan. Ditambah lagi, Rumania merupakan eks negara komunis yang berpenduduk 20 juta orang, diterpa krisis ekonomi besar. Hal ini diperparah dengan korupsi dan penggelapan pajak yang kerap terjadi. Akibat dari itu, Rumania merupakan salah satu negara termiskin di Benua Eropa. [ysa]



FAKTA RUMANIA

Rumania, di sebelah utara, berbatasan dengan Laut Hitam. Di bagian barat, Rumania berbatasan dengan Hongaria dan Serbia. Di sebelah timur laut, Rumania berbatasan dengan Ukraina dan Republik Moldova. Sementara di selatan berbatasan dengan Bulgaria.

Sejarah mencatat bahwa bangsa Dacia, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bulgaria, Kerajaan Hongaria, dan Kesultanan Utsmaniyah pernah menguasai wilayah ini. Sebagai sebuah negara, Rumania terbentuk pada tahun 1859 dari penyatuan wilayah Moldavia dan Wallachia, dan memperoleh pengakuan internasional pada tahun 1878. Pada tahun 1918, Transilvania, Bukovina dan Bessarabia menyatakan bergabung dengan Rumania.

Pada akhir Perang Dunia II, Uni Soviet menduduki sebagian wilayahnya, dan Rumania menjadi anggota Pakta Warsawa. Dengan runtuhnya Tirai Besi pada tahun 1989, Rumania memulai reformasi politik dan ekonomi. Dalam menghadapi masalah ekonomi pasca-revolusi, negara ini menerapkan pajak rendah pada tahun 2005 dan bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 2007.

Meskipun tingkat pendapatan Rumania termasuk salah satu yang terendah di Uni Eropa, reformasi telah meningkatkan pertumbuhan ekonominya.



KPU menjalin MoU dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang penelitian dan pengembangan kepemiluan.



Ketua KPU berjabat tangan dengan pimpinan LIPI.



Ketua KPU menyerahkan draft MoU kepada pimpinan Bridge Indonesia Network.



MoU KPU dengan IPC tentang Pembangunan SDM di Bidang Demokrasi.



Ketua KPU foto bersama dengan pimpinan IPC dan BIN.



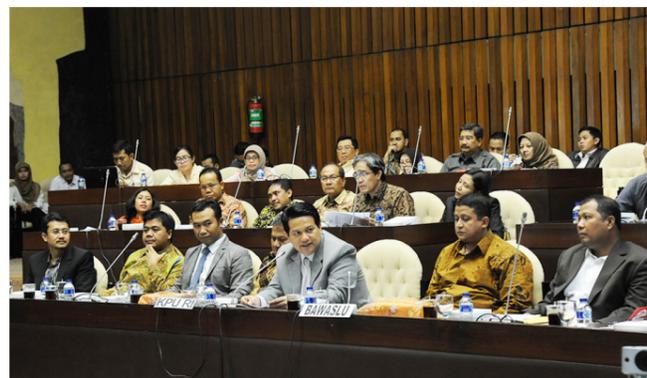
Audiensi Dengan Duta Besar Brasil Mengenai Teknologi Komputer Dalam Pelaksanaan Pemilu



Peresmian Gedung KPU Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu.



Audiensi Dengan Duta Besar Brasil Mengenai Teknologi Komputer Dalam Pelaksanaan Pemilu



RDP Perdana dengan Anggota DPR RI 2014-2019



Walikota Bandar Lampung, Herman, menggunting pita Peresmian Gedung KPU.



Karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi di pinggir jalan.



Pimpinan KPU serius memperhatikan masukan-masukan dari DPR.



Pimpinan KPU menjelaskan capaian program yang telah dilaksanakan KPU.



Ketua KPU Husni Kamil Manik foto bersama dengan para tamu undangan.



Ketua KPU Husni Kamil Manik meninjau gedung.



Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 di Batam



Pimpinan KPU kompak berada di atas panggung kehormatan.



Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah (tengah) tampil semangat di sela-sela kegiatan.



Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah serius mengikuti jalannya Konferensi Nasional Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu.



Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah memberikan pengarahan kepada peserta Konferensi Nasional Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu.

Menjaga Pertumbuhan Demokrasi Lewat Pemilihan Langsung dan Serentak

Oleh:

Dr. Andriansyah, M.Si

Wakil Rektor Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) Jakarta

INDONESIA, negara yang kaya melimpah akan sumber daya alam, kebudayaan, tradisi dan juga populasi manusianya. Tentu saja, dampak dari kekayaan luar biasa multi dimensi yang dimilikinya berkenaan pada tingkah laku politik masyarakat dan pemerintahannya.

Tak salah jika kita disebut sebagai salah satu yang paling menonjol di antara negara-negara demokrasi terbesar dunia saat ini. Karena itu apa saja yang berkaitan dengan Pemilihan Umum di Indonesia, selalu saja menarik perhatian publik internasional, terutama negara demokrasi maju dan negara-negara yang sedang membangun sistem politiknya sebagai bahan pembelajaran.

Meski banyak data menyebut tingkat partisipasi politik di bilik Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2014 menurun dibandingkan pemilihan 2009, namun tak bisa disangkal bahwa atensi masyarakat dunia terhadap konstelasi politik jelang Pemilihan Presiden 2014 lalu begitu besar. Terlihat dari intensitas pemberitaan media-media internasional terkemuka yang tak sedikit menaruh perhatiannya kepada pertarungan dua pasangan calon pemimpin RI.

Baiklah itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Tetapi, pekerjaan rumah demokrasi kita belum tuntas. Secara nasional, pemilihan berjalan baik. Tetapi, bagaimana dengan pemilihan tingkat lokal daerah-daerah di era otonomi khusus ini? Apakah lingkungannya yang kecil bisa menjadi alasan kita untuk bersikap acuh tak acuh?



Tentu saja tidak. Apalagi di tengah absurditas kondisi politik di parlemen dan potensi konflik yang masih cukup tinggi di daerah-daerah tertentu.

Polemik Perppu

Polemik seputar penerapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sempat melahirkan potensi penundaan tahapan pemilihan yang sedianya berlangsung serentak pada tahun 2015.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pilkada yang semula dilahirkan DPR untuk dilakukannya perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, ternyata dianulir oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014.

Dua Perppu ditandatangani Susilo Bambang Yudhoyono sebelum ia diberhentikan secara konstitusional sebagai Presiden RI keenam, yakni

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, dengan berbagai perbaikan dari sistem Pilkada yang selama ini dianut berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 menghapus sejumlah kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara tidak langsung. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan, bahwa Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak. Tegas-tegas mekanisme yang dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemilihan langsung dengan KPU sebagai pelaksananya.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung atau bisa kita istilahkan Pilkada Langsung, menurut hemat saya adalah mekanisme yang sangat dan paling baik dalam membangun pemahaman dan pembelajaran demokrasi bangsa. Selain itu, dengan adanya mekanisme pemilihan langsung, masyarakat akan benar-benar merasakan atmosfer demokrasi.

Dilatarbelakangi Kekhawatiran

Meski demikian, masih ada kekhawatiran akan masalah yang cukup besar. Masalah pertama yang muncul adalah apabila DPR menolak Perppu tersebut. Apakah mekanisme demokrasi yang akan berlaku dan diterapkan masyarakat Indonesia dalam memilih kepala daerahnya?

Apakah beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan akan tetap digelar melalui DPRD seperti yang tercantum di dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada, dan sudah disetujui DPR pada 26 September 2014?

Bukannya menghilangkan kegelisahan, Perppu malah menimbulkan keragu-raguan dalam melaksanakan tahapan pilkada yang seharusnya digelar serentak alias serempak kompak pada 2015.

Para pakar hukum tata negara memberikan dukungannya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, agar tidak ragu untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2015. Namun apakah benar, dengan lahirnya Perppu Nomor 1 tahun 2014, maka UU Pilkada Nomor 22 tahun 2014 secara otomatis sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku?

Sebagai pengamat politik sekaligus warga negara biasa yang begitu

menyukai partisipasi langsung rakyat dalam kehidupan demokrasi, saya secara subjektif tentu akan mengatakan UU Nomor 22 tahun 2014 seharusnya secara otomatis sudah tidak berlaku lagi setelah lahirnya Perppu nomor 1 tahun 2014.

Dengan begitu saya berharap seluruh daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2015 sudah harus mempersiapkan diri menggelar pemilihan serentak.

Namun kembali kekhawatiran meluap ketika kita mengetahui Perppu masih harus diproses di DPR, yang paling cepat baru bisa dilakukan pada Januari 2015.

Bisa kita pahami pernyataan Ketua KPU Husni Kamil Manik yang menyebutkan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak di provinsi, kabupaten dan kota terancam tidak selesai tahun 2015. Coba hitung saja secara realistis. Kalau pembahasan Perppu bikinan SBY itu baru dimulai Januari 2015, pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota akan berlangsung hingga 2016.

Menjaga Pertumbuhan Demokrasi

Apapun itu, dan bagaimanapun caranya, saya yakin dalam hati saya yang paling kecil bahwa suara masyarakat

Indonesia akan mempertahankan untuk diadakannya pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan sesuai Perppu Nomor 1 tahun 2014, serentak dan langsung.

Kita harus mendukung langkah KPU menyiapkan belasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk mendukung pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2015 berdasarkan Perppu Nomor 1 tahun 2014.

Kita harus yakin, berdasarkan kiprah KPU yang begitu adil dan netral dalam mengatur penyelenggaraan Pemilu 2014, yang dikenal paling bengis dan sadis itu, segala PKPU yang dikeluarkan KPU adalah dilakukan secara hati-hati sesuai Perppu yang ada agar tak terjadi tumpang tindih antar peraturan.

Memang yang harus dicermati di sini, belajar dari pemilu 2014 yang dianggap pemilu paling brutal, KPU sudah seharusnya benar-benar serius dalam menangani pemilihan secara serentak dan langsung.

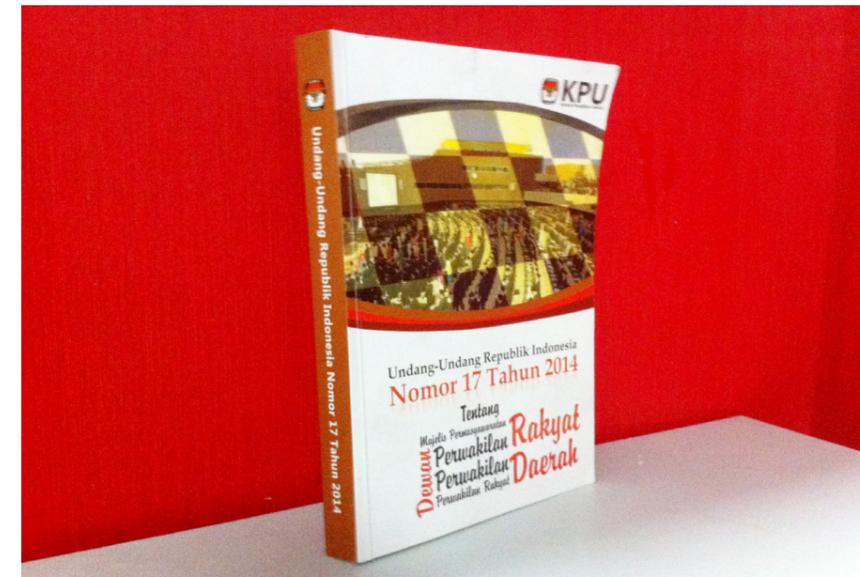
Kalau pemilihan serentak tidak dipersiapkan dengan serius, yakinlah, dampaknya adalah kepada potensi konflik horizontal yang semakin mengancam. Jangan sampai ini bakal menjadi batu sandungan KPU.

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan KPU untuk pemilihan secara serentak, mulai dari Peraturan-peraturan KPU sampai dengan kesiapan anggaran. Nah inilah yang sering kita lupakan. Apakah pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak ini sudah siap secara alokasi dananya? Kalau belum tentu saja akan menjadi persoalan baru.

Melihat permasalahan itu semua, sikap optimisme harus tetap kita kembangkan. Yang terpenting adalah bagaimana KPU benar-benar berbenah diri menyiapkan tahapan pilkada serentak secara baik, terutama dalam bidang sumber daya manusia mulai dari Komisioner KPU RI sampai pada penyelenggara pemilu tingkatan terkecil. [***]

KPU Terbitkan Buku UU 17/2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Parlemen berasal dari kata *parlee*, yang merupakan bahasa Prancis, yang artinya berbicara. Karena itu parlemen sangat identik dengan bicara. Sejak era Romawi kuno, salah satu syarat utama menjadi anggota parlemen dan senator adalah jago pidato. Dan Akan terasa aneh bila ada anggota parlemen tidak pernah bicara.



Suara KPU. Anggota parlemen yang tidak pernah bicara sama artinya tidak bekerja.

Namun pembicaraan seorang anggota parlemen bukanlah pembicaraan biasa. Ia harus bicara dalam kerangka tugas dan fungsinya. Secara prinsip, fungsi parlemen berkaitan dengan fungsi perwakilan dan fungsi permusyawaratan. Fungsi perwakilan yaitu untuk mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat dengan cara duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Sementara fungsi permusyawaratan merupakan deliberasi untuk pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan dan untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Kedua fungsi pokok tersebut dijabarkan dalam tiga kegiatan pokok yang selama ini lebih dikenal dan biasa disebut sebagai fungsi parlemen, yaitu (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi anggaran.

Fungsi-fungsi ini bersifat umum.

Secara teknis, perlu penjabaran yang lebih detail untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Di saat yang sama juga, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat memang diperlukan suatu aturan atau UU yang mengatur kedudukan parlemen. Karena itulah, KPU menerbitkan buku UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Belakangan UU ini sering disebut sebagai UU MD3.

Dasar pertimbangan UU ini dibuat adalah agar MPR, DPR, DPD, dan DPRD mampu menegajawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku yang diterbitkan KPU dengan 306 halaman ini murni berisi UU. Karena itu, di satu sisi, mungkin cukup

melelahkan bagi yang tak terbiasa baca UU. Namun di sisi lain, buku ini sangat bermanfaat. Dan dengan tanpa penjabaran yang seringkali malah menjadi spekulatif, buku UU ini menghadirkan isi apa adanya UU.

Misalnya terkait dengan kewenangan DPR, pembaca bisa mengetahui secara pasti apa saja kewenangan DPR itu. Misalnya membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. DPR juga berwenang memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menjadi UU.

Sementara di antara tugas DPR adalah menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi nasional. DPR juga bertugas menyusun, membahas, dan menyebarluaskan RUU. Di saat yang sama, DPR juga bertugas menerima RUU yang diajukan DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemerataan serta penggabungan daerah, pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dengan membaca UU ini, maka bisa tahu dan paham apa saja tugas dan wewenang DPR, tugas dan wewenang MPR, tugas dan wewenang DPRD, tugas dan wewenang DPD. Dengan membaca buku ini juga kita bisa tahu duduk persoalan dan apa saja konteksnya dalam memahami perdebatan di parlemen.

Buku UU ini layak dimiliki dan dibaca siapa saja. [yan]

“Kalau pemilihan serentak tidak dipersiapkan dengan serius, yakinlah, dampaknya adalah kepada potensi konflik horizontal yang semakin mengancam. Jangan sampai ini bakal menjadi batu sandungan KPU.”

Pemilu 2014 Benar-benar Membanggakan



SUARA KPU. Pesta demokrasi lima tahunan yang belum lama ini dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia memberi kesan berbeda di mata finalis stand up comedy, Mosidik.

Pria berbadan tambun itu mengaku kalau perpecahan kubu yang terbagi menjadi dua kubu besar layaknya pemilu yang digelar di Amerika Serikat pada 2012 lalu, di mana Barack Obama bersaing ketat melawan seorang politisi Partai Republik yang juga mantan Gubernur Massachusetts, Mitt Romney. Hal ini

dikarenakan para kandidat calon presiden (capres) masing-masing memiliki figur yang sangat kuat. Bahkan, Mosidik mengatakan baru kali ini keluarganya tidak satu suara memilih capres.

"Dua kubu, dua kutub, dan dua karakter. Ini juga kali pertama di rumah saya (suara) tidak seragam. Kakak, ibu dan ayah di kubu yang satu, sementara saya, istri dan adik di kubu yang satu lagi. Seru!" ungkap komika asal Bandung itu.

Sebagai kalangan muda, Mosidik merasa bangga atas antusias positif para pemuda yang lebih pro aktif dalam pemilu tahun ini.

"Membanggakan! Ini salah satu keberhasilan bangsa. Generasi muda yang hobinya hampur-hampur uang, pornografi dan pacaran bebas ini akhirnya menyadari harga suara mereka di Pemilu," ujarnya.

Tak hanya itu, pria yang mengawali karier sebagai penyiar radio ini mengapresiasi kinerja KPU yang baik meskipun ada sedikit kendala di daerah-daerah.

Saat ditanya masalah rencana KPU yang akan menerapkan e-voting dalam pemilu mendatang, Mosidik ini mengaku setuju karena untuk meminimalisir adanya kecurangan.

"Setuju! Hasil pemilu lebih cepat, tidak akan ada kebocoran ketika membawa surat suara dari daerah ke pusat. Its about time!" tandasnya. **[sof]**

CHELSEA OLIVIA:

Paling Lama Di Bilik Suara

SUARA KPU. "Peace. Damai itu keren. Indah. Tolong pemilu nanti jangan berantem lagi. Kita semua saudara. Sebangsa dan setanah air"

Lain lagi dengan Chelsea Olivia yang mengaku baru tahun ini baru pertama kali nyoblos pemilu. "Sempet bingung mau pilih yang mana. Habis calonnya bagus-bagus dan ganteng-ganteng semua," kata Chelsea sambil tertawa terbahak-bahak.

Dibalik bibir mungil pemeran utama sinetron Cinta Itu Anugerah tersimpan harapan besar menginginkan pemilu berjalan damai tanpa kekerasan.

"Peace. Damai itu keren. Indah. Tolong pemilu nanti jangan berantem



lagi. Kita semua saudara. Sebangsa dan setanah air," ajak Chelsea.

Ketika ditanya peran KPU, dengan lugas ia menjawab, "Sudah baik. Itu acara debat capres bagus banget. Itu bisa jadi pendidikan politik buat rakyat Indonesia terutama untuk anak-anak muda kayak aku ini. Ada debat Capres aja kadang temen-temen aja masih bingung, apa lagi gak ada," katanya lagi.

Diakui Chelsea ia yang paling lama di bilik suara.

"Bingung mas, pilih yang mana. Di balik bilik kayanya saya yg paling lama nyoblos," tuturnya lagi. **[mel]**

DEWI 'DEE' LESTARI:

Jempol Untuk KPU



SUARA KPU. Pagelaran pesta demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 kemarin sangat membekas bagi seorang penyanyi dan penulis seperti Dewi Lestari. Bagaimana tidak, wanita cantik kelahiran Bandung 38 tahun silam ini mengaku kalau sebelum-sebelumnya ia enggan berpartisipasi untuk menggunakan hak suaranya.

"Partisipasi kita fokus di sosial media.

Kami cuma bermodal group Whatsapp, isinya orang-orang industri kreatif, dari mulai sutradara sampai selebritas. Bahkan saya dan suami sampai ikut mengawasi juga penghitungan suara di TPS saya," ungkap si penulis novel Perahu Kertas dan Rectoverso ini.

Dee merasa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling seru dan tajam. Hal ini dikarenakan kuatnya figur kedua capres

dalam Pemilu 2014 memang memicu banyaknya dukungan kalangan muda.

"Secara umum kepedulian politik memang meningkat jauh di Pemilu 2014. Saya sangat senang dengan banyaknya anak muda yang berkampanye kreatif dan memanfaatkan teknologi untuk ikut mengawasi pemilu seperti Kawalpemilu.org. Saya membayangkan Indonesia akan punya darah segar untuk kehidupan politik jika anak-anak muda lebih banyak terlibat dan turun tangan," lanjutnya.

Oleh karena itu, mantan istri Marcell Siahaan ini mengacungkan jempol atas kinerja KPU yang telah bekerja ekstra keras dan memiliki peran yang luar biasa krusial dalam Pemilu 2014.

"Banyak momen kritis dalam Pemilu 2014 yang akhirnya bergantung pada keputusan dan kejernihan KPU. Salah satu langkah yang patut diacungi jempol adalah memberikan data terbuka bagi masyarakat yang memberikan ruang gerak bagi para penghitung independen untuk ikut mengawasi jalannya pemilu. Ini akan jadi preseden baik bagi pemilu ke depan," lanjutnya. **[sof]**

LAUDYA CYNTHIA BELLA:

Hampir Telat

SUARA KPU. "Tadi hampir telat. Seru banget. Semoga satu suara dari aku membuat Indonesia menjadi jujur dan semakin jaya"

Bintang film Virgin, Laudya Cynthia Bella, mengaku gembira bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu tahun ini. Kecantikan wajahnya telah menyinari kotak suara pemilu untuk kemajuan demokrasi ibu pertiwi.

"Aku sudah nyoblos. Tadi hampir telat. Seru banget. Semoga satu suara dari aku membuat Indonesia menjadi jujur dan semakin jaya," pesan Bella sambil tersenyum manis.

Kata Bella, meski kandidat pemilihan presiden cuma dua tapi itu sudah mencerminkan kualitas pemimpin yang diinginkan rakyat. "Kualitasnya bagus semua. Terus dua-duanya juga ganteng. Keren.

Tapi dilihat juga nih janjinya waktu kampanye sesuai gak dengan kalau sudah terpilih," kritik Bella.

Bella melihat ada dorongan yang kuat dari kedua calon presiden untuk membuat Indonesia lebih maju dari negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, peran KPU dalam mensosialisasikan pelaksanaan pemilu ke seluruh lapisan masyarakat sangat baik.

"Hampir seluruh komunitas terutama anak muda kayak aku ini disentuh KPU. Jadi, kalo aku lihat sih, golput anak muda di pemilihan presiden tahun ini kayaknya turun dari tahun lalu. Itu pendapat aku loh. Mungkin KPU punya data yang lebih lengkap dan akurat lagi," tandasnya lagi. **[Me]**





Cara Mudah Memilih Jas Hujan

Di kala musim hujan, yang ada di benak bikers adalah jas hujan sebagai kebutuhan penting. Namun, saking banyaknya ragam dan jenis jas hujan membuat kita bingung memilihnya.



Suara KPU. Bukan apa-apa, salah memilih jas hujan bisa fatal akibatnya. Memang secara tampilan kadang terlihat bagus, tapi kalau material maupun jahitannya tidak bagus, potensi kebocoran bakal selalu ada.

Tapi tenang, dengan tips sederhana ini, Anda tidak akan membeli jas hujan seperti membeli kucing dalam karung.

Pertama, saat membeli jas hujan hindari jas hujan model ponco atau tanpa sambungan. Jas hujan seperti ini kerap merepotkan dan berbahaya karena sering tersangkut di gir belakang motor.

Jadi disarankan untuk membeli jas hujan dengan model seperti baju dan celana, dan usahakan yang pas di badan sehingga tidak mengganggu

pengendalian.

Kemudian soal bahannya, pilih jas hujan yang menggunakan bahan Polyvinyl Chloride (PVC). Jas hujan seperti ini tidak tembus air meski dihadapkan dengan hujan lebat sekaligus.

Bahan PVC ini memiliki pori-pori yang lebih ketat dan halus dibandingkan dengan jas hujan berbahan parasut yang mudah menyerap air karena pori-porinya besar.

Lalu cek resleting dan jahitannya, pastikan resleting dari bahan yang kuat. Juga perhatikan bagian jahitan. Ada baiknya yang dipress, karena kalau cuma jahitan masih ada kemungkinan bocor. Bakal lebih baik kalau dijahit kemudian dilapisi press. **[ald]**

“Bahan PVC ini memiliki pori-pori yang lebih ketat dan halus dibandingkan dengan jas hujan berbahan parasut yang mudah menyerap air karena pori-porinya besar.”

Gejala Depresi Pada Anak Remaja dan Efek Buruknya

Anak remaja yang mengalami depresi dapat menimbulkan efek merugikan pada kehidupan dirinya sendiri. Cara paling mudah untuk melindungi kehidupan anak yang sedang depresi adalah mendeteksi secara dini gejala depresi pada anak, lalu memberikan penanganan agar kehidupannya terselamatkan.

SUARA KPU. Berikut ini adalah tanda-tanda apabila seorang anak mengalami depresi: Pertama, uring-uringan atau gampang marah. Ini adalah gejala yang paling umum dari orang yang depresi.

Bahkan dalam beberapa kasus sering terjadi ledakan amarah. Kedua, merasakan sakit atau nyeri yang samar-samar. Apabila seorang remaja merasakan sakit kepala, sakit perut, dan keluhan lain yang tak nampak secara fisik penyebabnya dan tak menunjukkan masalah medis maka kemungkinan si anak mengalami depresi.

Ketiga, peka terhadap kritik. Seseorang yang sensitif terhadap kritikan terkadang normal. Akan tetapi bila seorang remaja terlalu marah ketika dikritik, bisa jadi remaja tersebut sedang mengalami depresi. Keempat, berkumpul dengan kenalan-kenalan baru. Jika seorang remaja menjauhi teman-teman lama, keluarga dan

sahabat kemudian lebih sering berkumpul dengan komunitas yang baru dikenalnya, ada kemungkinan si anak sedang depresi.

Mengapa kita harus secepatnya menolong remaja yang depresi? Karena depresi pada anak remaja potensial membawa efek buruk dalam kehidupannya bahkan dapat mengancam kehidupan remaja dan sangat sulit untuk dipulihkan.

Berikut ini adalah berbagai dampak buruk remaja yang depresi: Pertama, bermasalah di sekolah, energi yang rendah menyebabkan sulit berkonsentrasi untuk menerima pelajaran.

Nilai rendah, tingkat kehadiran buruk, dan tidak sanggup mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kedua, perasaan rendah diri sangat dominan, mengalami gangguan makan, bahkan anoreksia.

Ketiga, kecanduan *game* komputer dan *surfing internet* sebagai mekanisme pelarian. Keempat, penyalahgunaan zat, seperti kecanduan alkohol atau pun obat-obatan terlarang. Kelima, sering berperilaku ceroboh, seperti kurang hati-hati dalam berkendara, sering ceroboh meletakkan benda-benda tidak pada tempatnya.

Sehingga potensial menyebabkan bencana. Keenam, kekerasan menjadi sifat dominan dalam kehidupan sehari-hari, timbul rasa kebencian pada seseorang. Ketujuh, mencederai diri sendiri, mulai dari menarik rambut sendiri sampai menyayat nadi sendiri.

Kedelapan, dalam tahap ekstrim, sering melontarkan komentar-komentar tentang kematian dan muncul hasrat untuk bunuh diri. Oleh karena itu depresi perlu dideteksi lebih dini agar si anak tidak terlanjur mengalami dampak buruknya. **[Mit]**





E-Voting dan Pilkada (Tidak) Langsung

TIDAK ada sistem yang dibuat manusia mampu bertahan 100 persen sama hingga kiamat, selalu ada perubahan sesuai dengan kebutuhan, selalu ada celah untuk diperbaiki.

Sebelumnya saya tidak terlalu peduli tentang perkara ini, mau dipilih langsung ataupun tidak rasanya tetap saja kita harus bekerja, berkreasi tanpa batas untuk buat hidup lebih bermakna. Bahwa perubahan bukan hanya perkara Wali Kota, Gubernur, DPRD ataupun Presiden, bahwa perubahan diciptakan dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

Polemik yang saya dengar, Pilkada langsung membutuhkan kas negara yang luar biasa besar, sekitar 50 triliun. Selain itu katanya, 82 persen penyebab korupsi kepala daerah dikarenakan menanggung biaya pencalonan yang besar. "Ongkos kendaraan" dalam menggunakan partai untuk menjadi calon wali kota/bupati/gubernur maupun pengeluaran real ketika kampanye berlangsung.

Ada juga yang bilang, kalau pilkada langsung tidak sesuai dengan Pancasila sila ke 4, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".

Izinkan saya sebagai orang awam nan fakir ilmu untuk mencari solusi singkat

dan umum untuk menjawab permasalahan tersebut.

Pengeluaran anggaran yang terlalu besar.

Berhubung saya lulusan teknik informatika, sepertinya salah satu jalan penghematan anggaran adalah pemanfaatan teknologi. Saya beranggapan salah satu biaya terbesar yang menguras kas negara untuk pilkada adalah surat suara, ini bisa digantikan dengan electronic voting (E-Vote). Dan e-vote bukanlah sesuatu yang baru, sebagian negara di dunia ini sudah menggunakan.

Takut hacker, takut sistemnya dimanipulasi? Emm, rasanya sama aja dengan voting dengan kertas. Intinya disini adalah pengawasan, infrastruktur yang memadai dan keterbukaan data ke publik. Dengan adanya electronic voting, ini jelas memangkas anggaran untuk pengadaan kertas dan perangkat, maupun pengumpulan suara berjenjang, dari TPS hingga ke KPU, yang selama ini prosesnya panjang sekali.

Tidak ada sistem yang aman 100%, ini yang perlu digaris bawahi, kata-kata yang selalu tertanam di otak saya sejak jaman kuliah dulu. Maka "Update berkala, bangun wall setinggi mungkin, monitoring hingga millisecond" adalah proses yang wajar untuk dilalui.

Ongkos kendaraan mahal karena tidak populis

Ini umumnya terjadi dibanyak daerah. Memang bukan hanya sekedar populis untuk bisa memenangkan atau syarat layak jadi pemimpin, tapi yang terpenting bagaimana kontribusi dan kemampuannya sudah banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bukan hanya ketika ingin maju menjadi kepala daerah.

Proses ini sebenarnya mengajarkan bagaimana seharusnya berdemokrasi, jangan meminta dukungan sedangkan belum memberikan apapun untuk masyarakat. Contoh nyata adalah Ridwan kamil, Jokowi, Bima Arya, Abdullah Azwar Anas, Heri Zudianto, Untung Saron dan nama-nama lain yang luar biasa memimpin kota dan kabupaten, setelah sebelumnya mereka sudah menjadi orang yang dicintai warga karena kontribusi terhadap daerahnya.

Ketika mereka sudah berkontribusi nyata dan menunjukan perilaku kepemimpinan yang layak diangkat, dengan sendirinya masyarakat akan menjadi kendaraan politik. Maka partailah yang akan berlomba-lomba memining mereka, paradigma politik konvensional pun berubah. Partai akan menggunakan tokoh-tokoh tersebut sebagai kendaraan politik, bukan lagi sebaliknya. Dan ketika mereka terpilih, tidak ada lagi

alasan harus balik modal, bayar utang saat berkampanye. Lihatlah bagaimana Jokowi mampu naik menjadi presiden karena keterlibatan masyarakat, artis dan seniman. Lihatlah bagaimana Ridwal Kamil memiliki ribuan volunteer saat masa kampanye. Inilah arti kendaraan politik yang sesungguhnya.

Harapan mengubah kota

Saya tinggal di Depok, sejak tahun 1995. Dari kecil hingga mencari sesuap nasi di kota ini. Hingga pada satu titik, melihat pemilu presiden kemarin yang melahirkan banyak sekali volunteer kedua calon, kubu Prabowo maupun kubu Jokowi. Lupakan kampanye hitam yang menyerang keduanya. Saya menyaksikan teman-teman saya di media sosial, mereka saling me-marketingkan jagoannya, bahkan sangat loyalis. Apa yang seru?

langsung, yang bukan hanya terjadi di tingkat nasional, namun hingga tingkat kota. Mereka semua menaruh harapan kepada sosok yang ingin mereka angkat menjadi calon pemimpinnya, bahkan gilanya mereka tidak segan merogoh kocek pribadi untuk membuat tokohnya sekedar masuk bursa calon Walikota.

Ini juga yang sedang saya lakukan di kota Depok bersama banyak teman lainnya, ketika kami merasa kota ini sangat haus dengan perubahan, sangat potensial dari pada hanya dijadikan sebagai "kota tempat tidur" bagi kita semua warga Depok, yang memang lebih banyak menghabiskan waktu bekerja di Jakarta. Kami semua yang sangat haus dengan transportasi publik yang layak, bukan dumelan macet yang tidak ada solusinya. Kami yang rindu berjalan kaki di trotoar jalanan. Kami yang rindu bermain di ruang terbuka

yang sering disebut oleh anggota DPR sebagai "TIM KAJIAN PUBLIK". Menggali sosok mulai dari track record, sikap dan pemikiran terhadap solusi kota. Kami menggiringnya ke ruang publik, ke banyak komunitas, kebanyakan forum-forum diskusi dan kegiatan.

Tidak ada uang yang mengalir dari tokoh ini, tidak ada sepeserpun yang kami minta. Kami lebih cenderung memanfaatkannya untuk mencari solusi terhadap kota, solusi real, bukan bualan. Jikalau nanti dia tidak menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi tokoh expert di tengah-tengah kota ini, yang mampu mengarahkan kami untuk membangun kota secara civic movement.

Tim ini sepakat, jika ditengah jalan orang ini dianggap tidak pantas memimpin kota Depok, kami tidak lanjutkan. Pertanyaannya, siapakah tim ini? Tim ini tidak lebih dari kumpulan orang yang sering "nongkrong", berdiskusi ngalor ngidul untuk membuat aktivitas dan gerakan positif dengan komunitasnya masing-masing, di tengah padatnya kesibukan bekerja. Kami tidak lebih dari itu. Tapi entah kenapa kami kumpulan orang yang sangat sedikit ini, mempunyai keyakinan, bahwa saat inilah bisa memiliki peran lain di kota Depok, selain menjalankan kegiatan-kegiatan rutin lainnya

Dan pilkada langsunglah yang membuat kami optimis, pilkada langsunglah yang membuat kami memiliki adrenalin lebih, beranggapan bahwa kami bisa terlibat melahirkan tokoh pemimpin yang sesuai dengan kota kami. Entah apa yang terjadi ketika pemilihan berada ditangan DPRD, sedangkan berita yang kami dapat, pelantikan DPRD saja diwarnai cekcok bahkan perkhelahan

Dan jika pilkada akan dilangsungkan di ruang DPRD tersebut, Entahlah. Saya, kami dan mungkin juga Anda hanyalah masyarakat sipil yang nantinya hanya memiliki harapan semu akan Kota/Kabupaten atau Negara yang lebih baik dan layak untuk dihuni. Entahlah. Ini hanya pendapat.

Tommy Herdiansyah

Penulis adalah inisiator komunitas Akademi Berbagi Depok dan co-founder dari coworking space Code Margonda. Saat ini penulis mengelola dua media digital lokal berbasis bisnis dan usaha kecil menengah (UKM)



Mereka bukanlah orang partai, baik partai pendukung maupun koalisi, mereka adalah masyarakat sipil yang tiba-tiba merasa suaranya seperti tim sukses dari Prabowo atau Jokowi. Tiba-tiba saja, mereka mengerti dan membela ideologi tertentu, betul-betul merasa bahwa apa yang dipikirkan, apa yang dipilih akan mengubah Indonesia secara signifikan.

Ini adalah effect hello dari pemilihan

hijau bersama keluarga di akhir pekan, bukan ke pusat perbelanjaan yang menggiring kami menjadi masyarakat konsumtif.

Kami mencari sosok, ketika nama-nama yang muncul di media terkait pilkada Depok 2015 kurang kami minati. Ketika ada seorang yang kami kira patut untuk digali lebih dalam, kami sepakat membentuk tim. Bukan tim sukses apalagi kemenangan, tim ini adalah tim

Kontestasi dan Partisipasi dalam Pilkada

Oleh:

Gebril Daulai

Tenaga Ahli Bidang Media dan Humas KPU RI

DEMOKRASI membutuhkan dua prasyarat minimal; kontestasi dan partisipasi. Kontestasi bermakna seberapa tinggi tingkat kompetisi yang terjadi antara individu atau partai politik untuk memperebutkan jabatan-jabatan di pemerintahan tanpa daya paksa dari satu pihak kepada pihak lain. Sementara partisipasi mengandung pengertian seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat.

Dua variabel demokrasi ini mesti terwujud pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara langsung Tahun 2015 sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2014. Perbaikan regulasi dan kualitas penyelenggara memiliki peran yang sangat strategis untuk menciptakan kontestasi yang sehat di antara para kandidat. Dari sisi penyelenggara, kapasitas, kredibilitas dan integritas menjadi kata kunci untuk menciptakan iklim penyelenggaraan pemilihan yang kondusif.

Kapasitas berkaitan dengan kemampuan penyelenggara dalam menjalankan fungsinya sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang. Sementara kredibilitas dan integritas berkaitan dengan kualitas pribadi yang dapat dipercaya. Penyelenggara yang memiliki kredibilitas dan integritas akan menghadirkan tata kelola pemilihan yang transparan, akuntabel, jujur dan adil. Karena itu, rekrutmen penyelenggara untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati. Dokumentasi tentang kinerja penyelenggara di level KPPS, PPS dan PPK dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses rekrutmen.

Penyelenggara dengan kinerja yang baik pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 harus didorong untuk kembali menjadi penyelenggara pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Tahun 2015. Sebaliknya, penyelenggara yang terbukti berkinerja buruk, melakukan pelanggaran dan telah dikenai saksi harus dicegah untuk kembali menjadi penyelenggara.



Berkaitan dengan partisipasi politik, mengacu pada pendapat Miriam Budiardjo (1994), menyebutkan batasan partisipasi politik sebagai kegiatan individu atau kelompok secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan negara dan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Hal senada diungkapkan Herbert McClosky yang dikutip oleh Budiardjo (1994) yang berkaitan dengan sifat sukarela dan proses pemilihan penguasa.

Untuk tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota, partisipasi politik warga untuk memilih pemimpin cukup mengkhawatirkan. Kita masih ingat ketika publik dikagetkan dengan rendahnya partisipasi pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 lalu, hanya 48 persen.

Meski tidak ada batasan yang jelas bahwa jumlah pemilih yang menggunakan haknya secara sah sebagai indikator keberhasilan demokrasi elektoral, namun kita bisa melihat derajat partisipasi politik sebagai respons atas pentingnya rekrutmen politik elit daerah. Sementara keterlibatan secara sukarela dalam pemilihan kepala daerah merupakan indikator positif atau negatifnya rakyat daerah sebagai warga yang mempunyai hak politik sebagai voter.

Tentu saja rakyat sebagai warga negara untuk dapat berperan aktif dalam partisi-

pasi politik perlu pendidikan politik dari berbagai agen. Penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan dapat disebut sebagai salah satu agen sosialisasi yang bertugas untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan. Untuk itu, penyelenggara perlu menciptakan ruang diskusi, pertukaran informasi, ide dan upaya saling mempengaruhi antara publik dengan penyelenggara maupun antara publik dengan kandidat.

Untuk memastikan diskusi dan pertukaran informasi itu berlangsung secara efektif maka penyelenggara Pemilu di setiap daerah perlu mengenali publik yang menjadi sasaran komunikasi. Pengenalan sasaran komunikasi akan menentukan apakah metode penyebaran informasi dan sosialisasi akan dilakukan secara tatap muka atau lewat media. Begitu juga pemilihan media yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi sangat tergantung dari karakter publik yang menjadi sasaran komunikasi.

Demokrasi idealnya mengedepankan transparansi. Menurut Katz (2004), transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga Negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Karena itu, dari sisi penyelenggara, penting menyediakan akses informasi bagi publik terhadap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, aturan main, informasi tentang diri kandidat, visi, misi dan program masing-masing kandidat.

Transparansi informasi akan mendorong masyarakat memiliki informasi yang cukup tentang kandidat dan proses pemilihan. Informasi yang berlimpah itulah yang akan menjadi bahan diskusi dan pertukaran gagasan antar publik dengan penyelenggara maupun antar publik dengan kandidat. Mekanisme ini akan mendorong lahirnya pemilih rasional, yaitu pemilih yang bertindak secara rasional ketika membuat pilihan di TPS. Pemilih yang rasional diharapkan melahirkan kepala daerah yang kompeten untuk memimpin daerah. [****]



KOMISI PEMILIHAN UMUM
www.kpu.go.id

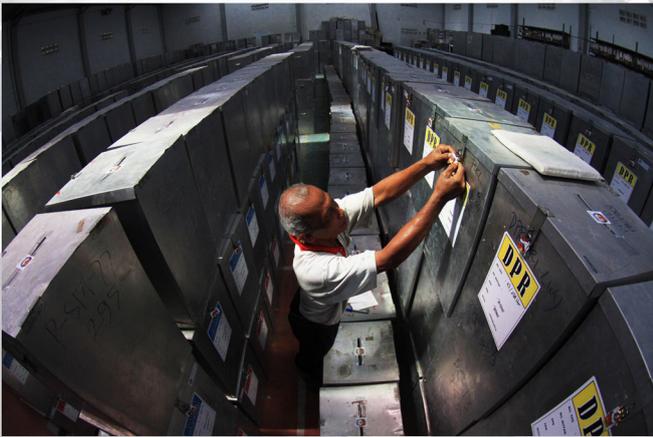
mata hati bersuara

walau tak sempurna, tetap angkat suara

Seluruh Warga Negara Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, tak terkecuali bagi pemilih berkebutuhan khusus, termasuk penyandang tuna netra. Mari kita bersama-sama menjunjung demokrasi dan sukseskan Pemilihan Umum untuk masa depan Republik Indonesia.



PARADE FOTO PEMENANG
LOMBA FOTO PEMILU 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM



PEUGAS MENYEGEL LOGISTIK PEMILU DI KANTOR KPU SOLO, **AKBAR GUMAY**



TIDAK BISA NYOBLOS DI TPS, NYOBLOS DI RUMAH PUN JADI, **FAUZAN R**



BANJIR POSTER, **FAZRY**



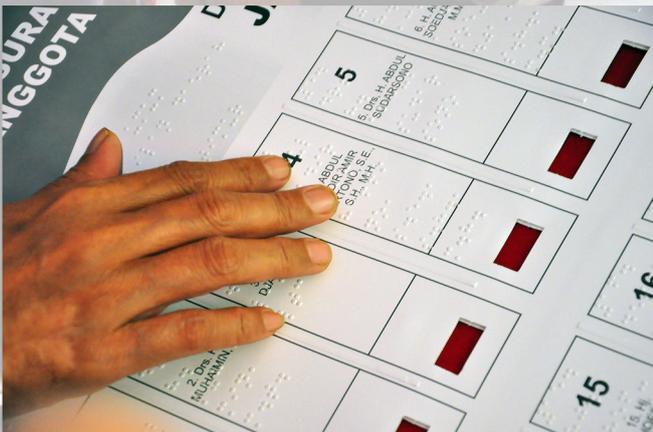
KOKI DEMOKRASI, **HADI PRAYOGO**



AKU JUGA INGIN NYOBLOS, **HARTANTOTAN**



MEMBANTU NENEK SEHABIS NYOBLOS, **I GEDE PUTU SETIAWAN**



KERTAS SUARA PENYANDANG TUNANETRA, **MUHAMMAD FIRMAN**



PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK, **HARTATIK**